



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya seluruh tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Tulang Bawang dapat terlaksana dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Secara umum kinerja Tahun 2025 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Analisis dan evaluasi objektif atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Untuk itu melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terwujud optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan.

Menggala, 14 April 2026

BUPATI TULANG BAWANG,

dto,

Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M.

IKTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintahan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Tulang Bawang Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tulang Bawang yang telah ditetapkan Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. Dalam menetapkan IKU tersebut mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama Bupati tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa 12 (dua belas) indikator sasaran atau sebanyak 85,71 % dalam kriteria Sangat Tinggi dan 2 (dua) indikator sasaran atau 14,28 % dalam kriteria Tinggi, dan 2 (dua) indikator sasaran belum diketahui nilai hasilnya.

Secara umum, capaian utama kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rata-Rata Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usaha Harapan Hidup (UHH)	105,29	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	100,60	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)		
3.	Meningkatnya Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	102,56	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	78,48	Tinggi
5.	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	97,41	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Pemerintahan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	93,72	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konektivitas Layanan Transfortasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	127,90	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	104,50	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	93,09	Sangat Tinggi
		Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)		
		Rasio Kewirausahaan Daerah		
10	Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Nilai Indeks Desa	97,15	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	100,49	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	86,59	Tinggi
		Indeks Pengelola Keuangan Daerah		
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP		
		Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDa)		
13	Meningkatnya Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan/Dikembangkan	91,60	Sangat Tinggi
		Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang Ditangani		
14	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	107,77	Sangat Tinggi
		Indeks Risiko Bencana (IRB)		

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kedepan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan berbagai unsur baik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung, daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah.

Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sendiri, ini dapat berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

 1.3 Sejarah Kabupaten Tulang Bawang 3

 1.4 Gambaran Umum Daerah 5

 1.4.1 Batas Administrasi 8

 1.4.2 Batas Administrasi Wilayah 8

 1.4.3 Topografi 9

 1.5 Gambaran Umum Demografi 10

 1.5.1 Jumlah Penduduk 10

 1.5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10

 1.6 Kondisi Ekonomi Daerah 13

 1.7 Sumber Daya Aparatur 15

 1.8 Struktur Organisasi Pemerintahan 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 2.1 Rencana Strategis 18

 2.2 Tujuan 21

 2.3 Sasaran 22

 2.4 Strategi 22

 2.5 Indikator Kinerja Utama 23

 2.6 Perjanjian Kinerja 27

 2.7 Program untuk Pencapaian Sasaran 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 31

 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama 33

 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 34

 3.4 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 37

 3.5 Akuntabilitas Kinerja 125

BAB IV PENUTUP 128

LAMPIRAN vi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah, Rasio Terhadap Total dan Jumlah Desa/Kampung	8
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin 2021-2025	12
Tabel 1.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Dalam Miliar Rupiah)	15
Tabel 2.1 Pengelompokan Tujuan dan Sasaran Kinerja	21
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	25
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	28
Tabel 2.4 Jumlah Program untuk Pencapaian Sasaran	29
Tabel 3.1 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	32
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama	34
Tabel 3.3 Sasaran dan Indikator Sasaran	35
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025	36
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1	37
Tabel 3.18 Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2025	40
Tabel 3.19 Kapasitas Tempat Tidur RSUD Menggala Tahun 2025	41
Tabel 3.20 Indikator Pelayanan RSUD Menggala Tahun 2025	42
Tabel 3.21 Cakupan Imunisasi Dasar pada bayi di Kab. Tulang Bawang	43
Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2	48
Tabel 3.10 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2024-2025	51
Tabel 3.11 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2024-2025	52
Tabel 3.12 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2024-2025	52
Tabel 3.13 Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2024-2025	53
Tabel 3.14 Perkembangan Angka Kelulusan (PAL) Tahun 2023/2024 dan 2024/2025	53
Tabel 3.15 Perkembangan Angka Melanjutkan (PAM) Tahun 2024-2025	54
Tabel 3.16 Perkembangan Daya Tampung Sekolah Tahun 2023-2024	54
Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3	58
Tabel 3.24 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4	63
Tabel 3.25 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5	66
Tabel 3.26 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6	72
Tabel 3.27 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7	78
Tabel 3.28 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8	82
Tabel 3.28 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9	84
Tabel 3.34 Jumlah UKM Per Kecamatan Tahun 2024 s/d 2025	90

Tabel 3.29	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10	93
Tabel 3.36	Hasil Pembangunan Dana Desa Tahun 202-2025	95
Tabel 3.35	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11	98
Tabel 3.36	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12	102
Tabel 3.38	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13	109
Tabel 3.30	Capaian Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial Tahun 2023-2024	87
Tabel 3.32	Rekapitulasi Data Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tahun 2023-2024 ..	88
Tabel 3.33	Koperasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2024	92
Tabel 3.35	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11	95
Tabel 3.36	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12	108
Tabel 3.37	Hasil Pembangunan Dana Desa Tahun 2023-2024	109
Tabel 3.38	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13	110
Tabel 3.7	Perkembangan Jumlah LSM, Ormas, OKP dan Parpol 2024-2025	114
Tabel 3.39	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14	114
Tabel 3.41	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.	125
Tabel 3.42	Anggaran dan Realisasi APBD Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025	126

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang	7
Gambar 1.2	Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Menurut Kecamatan	9
Gambar 1.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025	11
Gambar 1.4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025	13
Gambar 1.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025	14
Gambar 1.6	Persentase Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan 2025 ...	16
Gambar 1.7	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.....	17
Gambar 3.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025	55
Gambar 3.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025	39
Gambar 1.4	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021-2025	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan kedepan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Tulang Bawang disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholder* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang selama Tahun

Anggaran 2025 yang merupakan tahun pertama RPJMD periode 2025-2029;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2025 dan sebagai bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

1.3 Sejarah Kabupaten Tulang Bawang

Dalam sejarah kebudayaan dan perdagangan di Nusantara, Tulang Bawang digambarkan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, disamping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad ke-4 seorang peziarah Agama Budha yang bernama *Fa-Hien*, dalam perjalanannya menuju India pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya, To-Lang P'o-Hwang (Tulang Bawang) di pedalaman Chrqse (pulau emas Sumatera). Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang, namun ahli sejarah Dr. J. W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di hulu Way Tulang Bawang (antara Menggala dan Pagardewa) kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala. Seiring dengan semakin berkembangnya kerajaan *Che-Li-P'o Chie* (Sriwijaya), nama dan kebesaran Tulang Bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya sulit sekali mendapatkan catatan sejarah mengenai perkembangan kerajaan ini.

Ketika Islam mulai masuk ke bumi Nusantara sekitar abad ke-15, Menggala dan alur sungai Tulang Bawang yang kembali marak dengan aneka komoditi, mulai kembali di kenal Eropa. Menggala dengan komoditi andalannya Lada Hitam, menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis yang didapat VOC dari Bandar Banten. Perdagangan yang terus berkembang, menyebabkan denyut nadi Sungai Tulang Bawang semakin kencang, dan pada masa itu kota Menggala dijadikan dermaga "BOOM", tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk Singapura. Perkembangan politik Pemerintahan Belanda yang terus berubah, membawa dampak dengan ditetapkannya Lampung berada dibawah pengawasan

langsung Gubernur Jenderal Herman Wiliam Deandles mulai tanggal 22 November 1808. Hal ini berimbas pada penataan sistem pemerintahan adat yang merupakan salah satu upaya Belanda untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Pemerintahan adat mulai ditata sedemikian rupa, sehingga terbentuk Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Kebuayan). Wilayah Tulang Bawang sendiri dibagi dalam 3 kebudayaan, yaitu Buay Bulan, Buay Tegamoan dan Buay Umpu (tahun 1914, menyusul dibentuk Buay Aji) Sistem Pemerintahan Marga tidak berjalan lama, dan pada tahun 1864 sesuai dengan Keputusan Kesiden Lampung No. 362/12 tanggal 31 Mei 1864, dibentuk sistem Pemerintahan Pesirah. Sejak itu pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan kolonial Belanda mulai dilakukan termasuk di Kabupaten Tulang Bawang

Pada zaman pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadidi daerah yang dijuluki “Sai Bumi Nengah Nyappur” ini. Dan akhirnya sesudah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, saat Lampung ditetapkan sebagai daerah Keresidenan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Tulang Bawang dijadikan wilayah Kewedanaan, sejalan dengan perkembangan Negara RI, maka setelah Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan, dengan membentuk Provinsi Lampung, status Menggala juga ditetapkan sebagai kecamatan di bawah naungan Kabupaten Lampung Utara. Proses berdirinya Kabupaten Tulang Bawang tidak begitu saja terjadi. Diawali dari rencana sesepuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah yang sejak tahun 1972 merencanakan mengembangkan Provinsi Lampung menjadi 10 Kabupaten/Kota, maka pada tahun 1981, Pemerintah Provinsi membentuk 8 Lembaga Pembantu Bupati, yang salah satunya adalah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26/502 tanggal 8 Juni 1981 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara Wilayah Propinsi Lampung.

Pada tahun 1997, dibentuklah Sekretariat Persiapan Kabupaten Tulang Bawang, dengan Sekretaris merangkap Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala Hi. Santori Hasan, SH. Selanjutnya untuk memuluskan pembentukan kabupaten, ditunjuklah Hi. Santori Hasan, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulang Bawang sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 9 Desember 1997 melalui Surat

LKjIP 2025

Keputusan Gubernur Nomor 821.2/II/09/97 tanggal 14 Januari 1997 tentang Penunjukan Plt. Bupati Kabupaten Tingkat II Persiapan Tulang Bawang, melalui serangkaian proses yang cukup panjang, akhirnya Kabupaten Tulang Bawang lahir dengan ibukota pemerintahan di Menggala, dan diresmikan keberadaannya oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1997, sebagai tindak lanjut ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

1.4 Gambaran Umum Daerah

1.4.1 Batas Administrasi

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu dari 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka terjadi pemekaran 2 (dua) daerah otonomi baru, dan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kabupaten Induk.

Batas wilayah administratif Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

➤ **Sebelah Utara :**

berbatasan dengan Kabupaten Mesuji

➤ **Sebelah Selatan :**

berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur

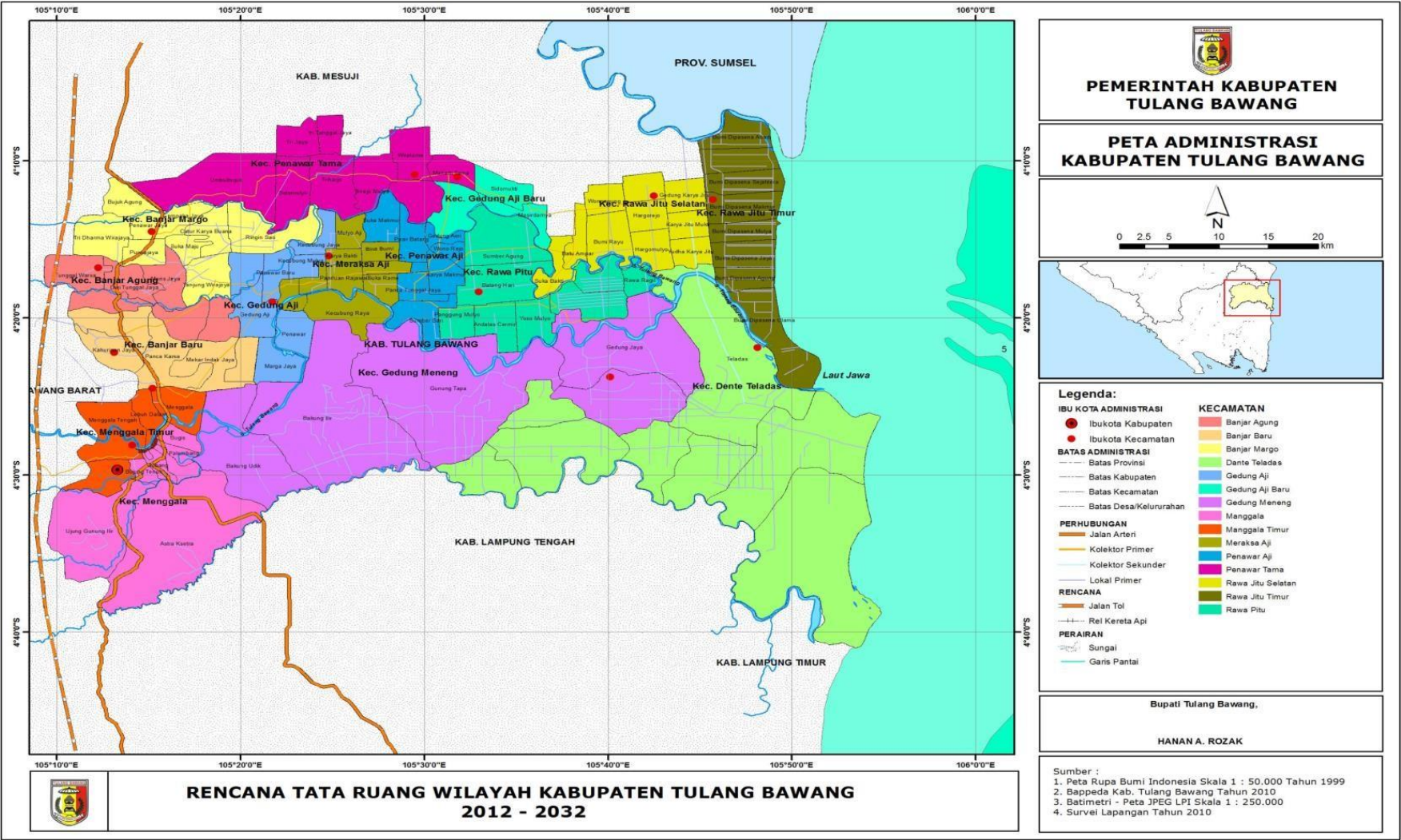
➤ **Sebelah Timur :**

berbatasan dengan kawasan pantai (Laut Jawa)

➤ **Sebelah Barat :**

berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang



Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dengan 147 Kampung dan 4 kelurahan

1.4.2 Batas Administrasi

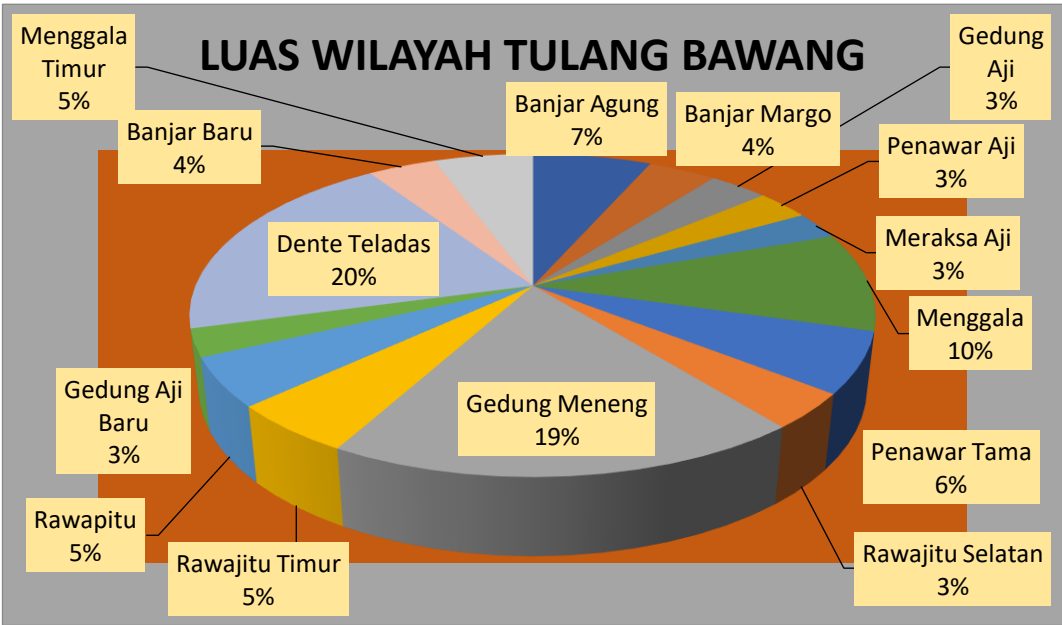
Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang terletak antara 40° 08' - 04° 41' Lintang Selatan dan 105° 09' - 105° 55' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.466,32 Km², yang terdiri atas

Tabel 1.1 Luas Wilayah, Rasio Terhadap Total dan Jumlah Desa/Kampung

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Total (%)	Jumlah Desa/Kampung
1.	Banjar Agung	230,88	6,66	11
2.	Banjar Margo	132,95	3,84	12
3.	Gedung Aji	114,47	3,30	10
4.	Penawar Aji	104,45	3,01	9
5.	Meraksa Aji	104,45	2,73	8
6.	Menggala	344,00	9,92	9
7.	Penawar Tama	210,53	6,07	14
8.	Rawajitu Selatan	176,65	3,58	9
9.	Gedung Meneng	657,07	18,96	11
10.	Rawajitu Timur	176,65	5,10	8
11.	Rawa Pitu	169,18	4,88	9
12.	Gedung Aji Baru	95,36	2,75	9
13.	Dente Teladas	685,65	19,78	12
14.	Banjar Baru	132,95	3,84	10
15.	Menggala Timur	344,00	5,58	10
Jumlah		3.466,32	100	151

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2026, BPS Kab. Tulang Bawang

Gambar 1.2 Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Menurut Kecamatan



Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka 2026, BPS Kab. Tulang Bawang

1.4.3 Topografi

Secara topografi Kabupaten Tulang Bawang dapat dibagi dalam 4 (empat) unit topografi, yaitu :

1. Daerah Dataran Hingga Dataran Bergelombang

Merupakan daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang, berada pada kemiringan antara 15% – 30% yang dimanfaatkan untuk area pertanian, perkebunan dan cadangan pengembangan transmigrasi.

2. Daerah Rawa

Daerah Rawa terdapat di sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0 – 1 m yang merupakan muara dari Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Daerah tersebut merupakan areal yang cukup produktif untuk pengembangan budidaya tambak dan perikanan laut.

3. Daerah River Basin

Terdiri dari 2 River Basin yang utama yaitu River Basin Tulang Bawang dan River Basin sungai-sungai kecil lainnya. Daerah ini berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau lebung-lebung. Pada areal River Basin Way Tulang Bawang dengan anak-anak sungainya membentuk pola aliran "dendritic". Daerah ini memiliki luas 10.150 Km² dengan panjang 753 Km yang digunakan untuk pengembangan tambak udang.

4. Daerah Alluvial

Daerah ini tertetak di pinggir pantai timur yang merupakan bagian hilir (*down steem*) dari sungai besar yaitu Way Tulang Bawang dan Way Mesuji yang dimanfaatkan untuk pelabuhan dan areal persawahan pasang surut.

1.5 Gambaran Umum Demografi

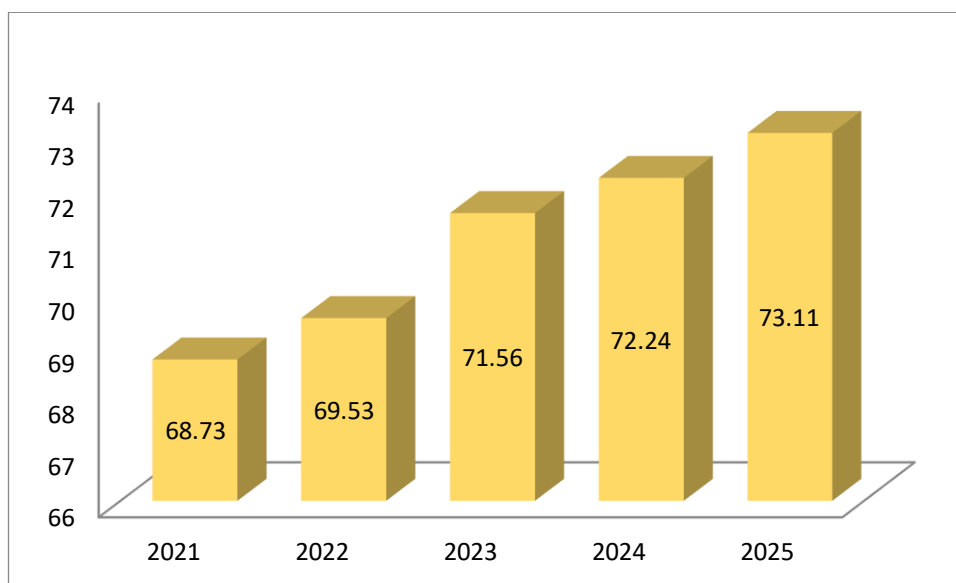
1.5.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 sebanyak 442.320 jiwa/orang, dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 228.675 jiwa/orang atau sebesar 51,69 % dan perempuan sebanyak 213.645 jiwa/orang atau sebesar 48,30 %. Kecamatan Dente Teladas merupakan kecamatan yang berpenduduk terbanyak yaitu sebanyak 56.289 jiwa/orang atau sebesar 12,72 %, sedang jumlah penduduk di Kecamatan Rawajitu Timur paling sedikit, yaitu sebanyak 14.820 jiwa atau sebesar 3,35 %

1.5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam konsep pembangunan manusia, manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan alat pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif *United Nation Development Program* (UNDP). Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 tercapai sebesar 73,11 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 72,24. Semua komponen pembentuk IPM untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan, terutama komponen pengeluaran per kapita sejumlah 12.513 Ribu Rupiah. Dibandingkan tahun 2024, pengeluaran per kapita naik 0,391 persen sebesar 12,122 Ribu Rupiah.

**Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tulang Bawang 2021-2025**



Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

Pembangunan manusia di Tulang Bawang terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Tulang Bawang sudah berada di level “tinggi”. Selama 2021–2025, IPM Tulang Bawang rata-rata meningkat rata-rata sebesar 6,3 persen per tahun. Capaian IPM Kabupaten Tulang Bawang terus meningkat menunjukkan perkembangan membaik dan masih bisa ditingkatkan dari tahun ketahun. Upaya peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan diharapkan lebih mengutamakan dalam perbaikan derajat kesehatan masyarakat penduduk meningkatkan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia akses penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas buang air besar penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal/rumah penduduk. Sedangkan Upaya peningkatan peningkatan laju pertumbuhan pertumbuhan indeks pengetahuan/ pendidikan agar meningkatkan partisipasi sekolah penduduk diupayakan anak-anak usia sekolah SD s/d SMP semuanya bisa bersekolah dan tidak putus sekolah. Upaya peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran meningkatkan daya beli penduduk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, buka lapangan usaha baru, masih diperlukan dukungan dari program-program pemerintah seperti BPNT, PKH, dan lain-lain.

1.5.3 Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat juga dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan masalah kemiskinan. Kemiskinan akan semakin meluas, jika perbedaan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang, sejak Tahun 2018 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Adapun data Garis kemiskinan, Penduduk Miskin dan persentasenya di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2021–2025 pada tabel di bawah ini :

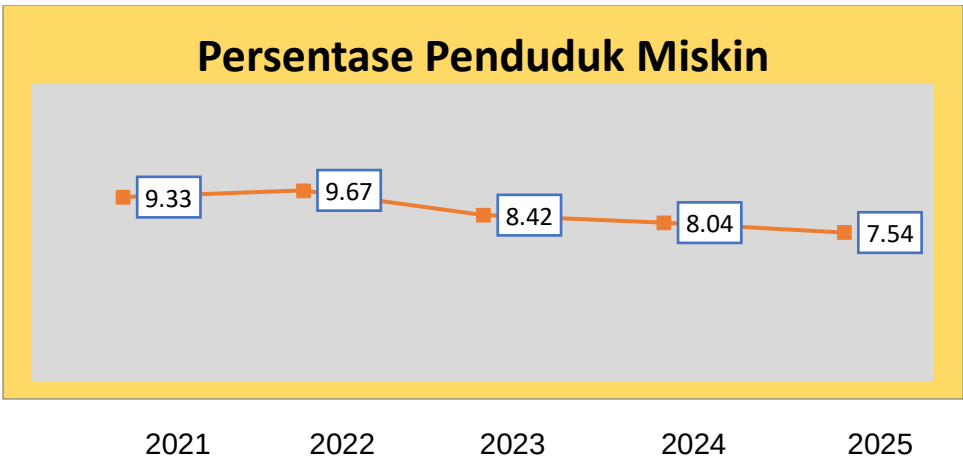
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase (%)
1.	2021	438.744	42.430	9,33
2.	2022	456.567	44.530	9,67
3.	2023	486.739	39.190	8,42
4.	2024	522.396	37.830	8,04
5.	2025	588.734	36.140	7,54

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang

Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 turun sebesar 0,5 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin sebesar 9,33% dan pada tahun 2025 turun menjadi 7,54 Persen atau turun sebesar 1,79 dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Gambar 1.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021- 2025



Sumber : BPS Tulang Bawang Tahun 2025

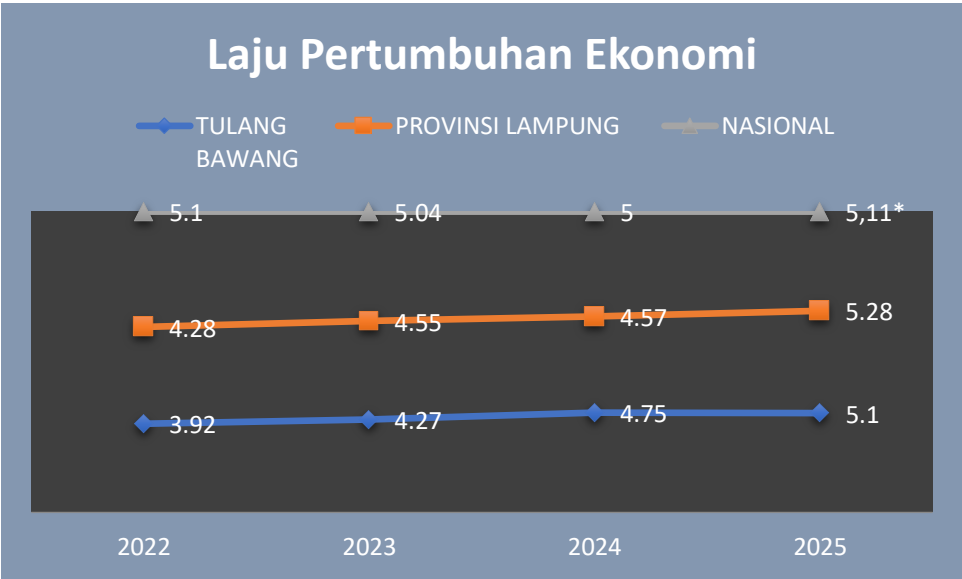
Akselerasi penanggulangan angka kemiskinan setiap tahunnya akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan melalui program berkelanjutan seperti : program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Program Keluarga Harapan (PKH), serta program-program pemberdayaan masyarakat. Selain itu melalui bantuan khusus Usaha Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Kabpaten Tulang Bawang secara berkesinambungan juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.

1.6 Kondisi Ekonomi Daerah

Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan semakin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja Struktur perekonomian sebagian besar masyarakat Tulang Bawang dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Tulang Bawang. Sumbangan terbesar pada tahun 2025 dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian kategori industri pengolahan, kemudian kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 diperkirakan mencapai sebesar 33.239,21 miliar rupiah atas dasar harga berlaku dan sebesar 19.155,48 miliar rupiah atas dasar harga konstan 2010. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 2.740,02 miliar rupiah (atas harga berlaku) dan sebesar 929,77 juta rupiah (atas harga konstan 2010) dibandingkan tahun 2024. Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari pulihnya permintaan domestik telah mendorong perbaikan aktivitas produksi sehingga membuat seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif di tahun 2025. Pemulihan yang terjadi di berbagai sektor utama, seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan mencerminkan aktivitas ekonomi sudah mulai bangkit kembali.

Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025



*Angka masih sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan RI

Memasuki tahun 2025, penguatan Perekonomian semakin berhasil mendorong ekonomi Tulang Bawang untuk tumbuh sebesar 5,10 %,di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang sebesar 5,28 % dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 % (angka tersebut masih sementara). Perbaikan di sisi ekonomi terus diiringi dengan perbaikan di sisi kesehatan, upaya penguatan dari sisi hulu hingga hilir, sebagai langkah memulihkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Tabel 1.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	24.166,43	25.998,56	28.197,25	30.499,19	33.239,21
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	16.062,91	16.694,18	17.395,15	18.225,71	19.155,48

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tulang Bawang

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk

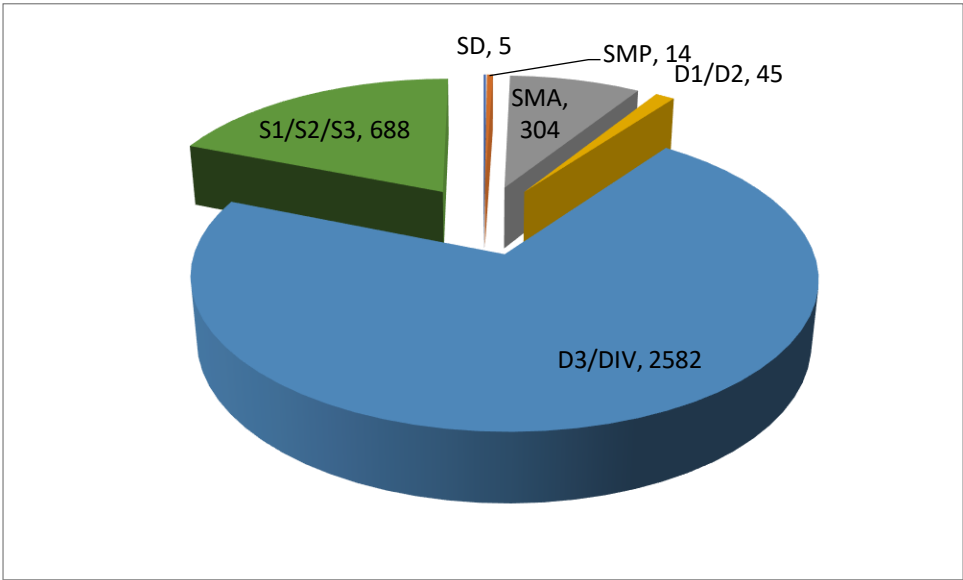
Nilai PDRB per kapita menurut lapangan usaha Kabupaten Tulang Bawang atas dasar harga berlaku sejak tahun 202 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar 33.239,21 Miliar Rupiah, secara nominal mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 30.499,19 miliar rupiah. Begitupun dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstans (ADHK) 2025 mengalami kenaikan sebesar 19.155,48 Miliar Rupiah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 18.225,71 Miliar Rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan positif.

1.7 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap organisasi, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya-sumber daya lainnya. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi dan mengendalikan sumber daya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif, sehingga birokrasi di organisasi publik seperti Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu dikelola secara optimal dalam rangka reformasi birokrasi.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, jumlah SDM/ASN se-Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2025 sebanyak 3.638 orang, terdiri dari 1.560 orang atau 42,88 % laki-laki dan 2.078 orang atau 57,11 % perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik. Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tulang Bawang didominasi oleh jenjang pendidikan DI/DII/DIII/S1/S2/S3 sebanyak 3.315 orang atau 91,12 %, disusul oleh jenjang pendidikan SD/SMP/SMA sebanyak 8,87 % atau 323 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Aparatur di Kabupaten Tulang Bawang sudah baik, Selengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 1.6 Persentase Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang

1.8 Struktur Organisasi Pemerintahan

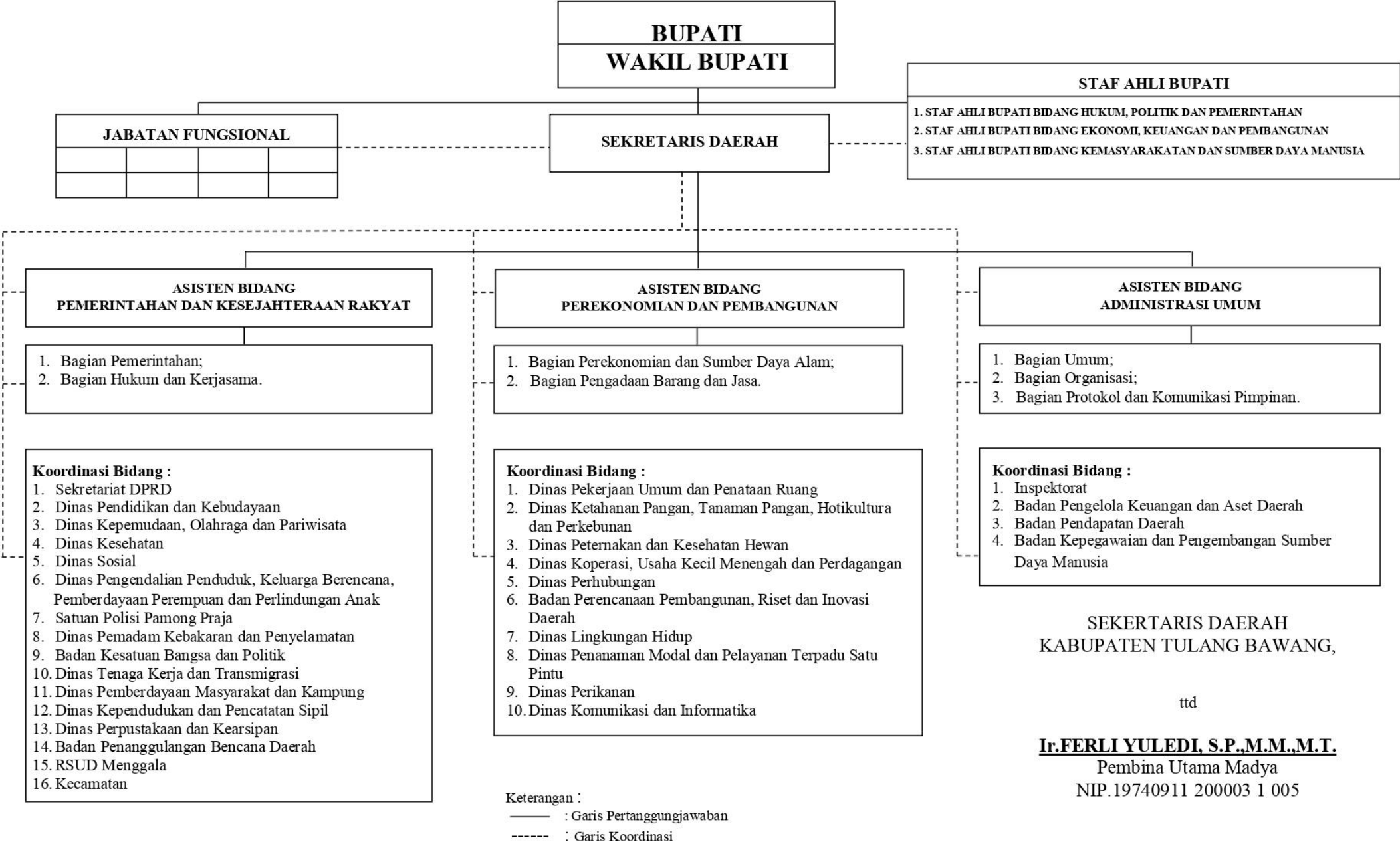
Berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, serta perpustakaan. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas lainnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dipimpin oleh seorang Bupati dengan dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana urusan daerah;
- c. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- d. Kecamatan dan Kelurahan, sebagai unsur kewilayahan.

Gambar 1.7 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka dokumen ini menjadi acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunannya. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 disusun dengan berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045, memperhatikan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 Strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah pusat.

2.2 Visi Kabupaten Tulang Bawang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 adalah :

“TULANG BAWANG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025-2029 merupakan tahap awal cita-cita pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam dokumen RPJPD tahun 2025-2029. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

MAJU, Pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan perkembangan zaman

INDONESIA EMAS 2045, Suatu kondisi adanya peningkatan dukungan kemandirian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal.

"Udang Manis" adalah slogan dan tagline resmi Kabupaten Tulang Bawang, yang merupakan akronim dari **Unggul, Damai, Aman, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, dan Sejahtera**. Tagline ini mencerminkan visi pembangunan daerah serta potensi utama wilayah, terutama tambak udang dan perkebunan tebu

Berikut adalah poin-poin penting mengenai Udang Manis Tulang Bawang :

Makna Akronim: Unggul, Damai, Aman, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, Sejahtera (UDANG MANIS).

Tujuan: Menciptakan Kabupaten Tulang Bawang yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta aman dan nyaman.

Latar Belakang: Slogan ini diciptakan untuk mengangkat potensi besar daerah, khususnya dalam industri tambak udang dan perkebunan tebu.

Semangat: "Udang Manis" digunakan sebagai motivasi untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai program, salah satunya senam bersama.

2.3 Misi Kabupaten Tulang Bawang :

Untuk mencapai visi Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025-2029, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan. Pernyataan misi pembangunan tersebut dijelaskan secara terperinci dalam uraian berikut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait arah dan fokus pembangunan yang akan dicapai.:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Sosial yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, peningkatan sarana prasarana kesehatan serta layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Selain itu, menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah bagian penting dari meningkatkan derajat sosial yang dapat dicapai melalui program bantuan sosial dan peningkatan lapangan kerja.

2. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah serta Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pemerataan antarwilayah, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar-pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas akan mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif menjadi penggerak dan penguat bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, serta investasi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dengan meningkatkan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan angka pengangguran dan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Berkualitas dan Akuntabel

Pembangunan lima tahun mendatang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap aspirasi masyarakat

4. Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Stabilitas Keamanan dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.

Masyarakat Tulang Bawang diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesantunan, kesopanan, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Di sisi lain, penguatan nilai-nilai religius yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi prioritas, guna menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan harmonis dalam kehidupan beragama. Dalam lingkungan yang aman dan demokratis, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Stabilitas sosial akan dijaga melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, dan non diskriminatif, dengan menumbuhkan rasa percaya antar-stakeholder pembangunan. Demokrasi yang sehat akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan pelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko bencana alam. Sebagai daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang. Infrastruktur tangguh yang dirancang sesuai dengan potensi dan risiko daerah akan menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang aman dan produktif.

2.4 Tujuan

Masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Stabilitas sosial akan dijaga melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, dan non diskriminatif, dengan menumbuhkan rasa percaya antar-stakeholder pembangunan. Demokrasi yang sehat akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan pelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko

bencana alam. Sebagai daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang. Infrastruktur tangguh yang dirancang sesuai dengan potensi dan risiko daerah akan menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang aman dan produktif.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD ini juga menjadi dasar dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan selaras dengan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Derajat Sosial Masyarakat;
3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur;
4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Daerah;
5. Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Daerah;
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
7. Meningkatkan Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

2.5 Sasaran

Berdasarkan rumusan Visi, Misi dan Tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sasaran pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat;
3. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak serta Daya Saing Kepemudaan;
4. Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Merata;
6. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah yang Mengarah pada Hilirisasi Sumber Daya Alam Secara Inklusif;
7. Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan;
8. Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah;
9. Meningkatnya nilai investasi yang mendorong pemerataan kegiatan ekonomi antarwilayah dan penciptaan lapangan kerja;
10. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel;
11. Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah;
12. Meningkatnya Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat;
13. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, telah dirumuskan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang saling berkaitan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran ini menggambarkan arah strategis pembangunan yang akan ditempuh dalam lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, sementara sasaran pembangunan disusun untuk memastikan pencapaian tujuan secara sistematis dan terukur. Dengan adanya keterpaduan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang dapat berjalan secara berkesinambungan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029.

2.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan

LKjIP 2025

upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat pemerintah daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Usaha Harapan Hidup (UHH)
		2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				3.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
		3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah	4.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2.	Meningkatnya Derajat Sosial Masyarakat	4.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	5.	Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga
		5.	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	6.	Tingkat Kemiskinan
3.	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	6.	Meningkatnya Pemerintahan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	7.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
		7.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konektivitas Layanan Transfortasi	8.	Rasio Konektivitas Kabupaten
4.	Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Daerah	8.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif	9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
		9.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	10.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
				11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				12.	Rasio Kewirausahaan Daerah
		10.	Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan	13.	Nilai Indeks Desa
		11.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah	14.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
		12.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	15.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				16.	Indeks Pengelola Keuangan Daerah
				17.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
				18.	Indeks pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP
				19.	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDa)
7.	Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah serta Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	13.	Meningkatnya Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	20.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan/Dikembangkan
				21.	Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani

8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	14.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	22.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				23.	Indeks Risiko Bencana (IRB)

2.6 Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, maka untuk tahun 2014 pelaporan kinerja telah diperbaiki dengan terbitnya Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja sebagai perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
2. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usaha Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,58
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,58
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,6
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,467
4.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	Persen	24,68
5.	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,74
6.	Meningkatnya Pemerintahan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen	62,16
7.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konektivitas Layanan Transfortasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	0,43
8.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,88
9.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	34,80
		Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,12-3,23
		Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	0,545
10	Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Nilai Indeks Desa	Angka	0,7455
11	Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	88,82
12	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Skor	63,00
		Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Indeks	69,50
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Skor	4,61
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP	Indeks	93,04
		Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDa)	Indeks	0,60
13	Meningkatnya Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan/Dikembangkan	Persen	38,46
		Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang Ditangani	Persen	100,00
14	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,61
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	81,91

2.7 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun jumlah program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Program
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	7
3.	Meningkatnya Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Daerah	8
4.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	4
5.	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	1
6.	Meningkatnya Pemerintahan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	6
7.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konektivitas Layanan Transfortasi	2
8.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif	-
9.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	6
10.	Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan	1
11.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah	3
12.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	6
13.	Meningkatnya Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6
14.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja, sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Tulang Bawang berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah melalui penyajian Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi

LKJIP 2025

keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kabupaten yang aman, mandiri dan sejahtera. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tersebut digunakan skala pengukuran nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

➤ **Indikator Sasaran**

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran

3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah ditetapkan tercantum dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan tercantum pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, Kebijakan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah harus menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Usaha Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,58	74,32
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,58	12,39
3.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,6	7,90
4.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,467	0,479
5.	Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	Persen	24,68	19,37
6.	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,74	7,54
7.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen	62,16	58,28
8.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	0,43	0,55
9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,88	5,10
10.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	34,80	34,09
11.	Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,12-3,23	3,19
12.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	0,545	0,450
13.	Nilai Indeks Desa	Angka	0,7455	0,7243
14.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	88,82	89,26
15.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Skor	63,00	60,23
16.	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Indeks	69,50	54,91
17.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Skor	4,61	3,71
18.	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP	Indeks	93,04	84,96
19.	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	Indeks	0,60	-
20.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan/Dikembangkan	Persen	38,46	32,00
21.	Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang Ditangani	Persen	100,00	100,00
22.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,61	70,71
23.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	81,91	-

Realisasi persentase rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025 adalah sebesar **99,05 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika serta tuntutan masyarakat, kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berupaya untuk terus dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan

kepedulian pemerintah daerah untuk selalu memperbaiki derajat pelayanannya. Oleh karenanya, segala program/kegiatan pembangunan pemerintah daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 14 (empat belas) dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2025

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1.	Sangat Tinggi	12	17
2.	Tinggi	2	6
3.	Sedang	-	-
4.	Rendah	-	-
5.	Sangat Rendah	-	-
6.	Belum Diketahui Hasilnya	2	2
Jumlah		16	25

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	95 s/d 100
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	105,29	-	-	-	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Masyarakat	2	100,60	-	-	-	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah	1	102,56	-	-	-	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	1	78,48	-	-	-	Tinggi
5.	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	1	97,41		-	-	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	1	93,72	-	-	-	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konektivitas Layanan Transformasi	1	127,90	-	-	-	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif	1	104,50	-	-	-	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	3	93,09	-	-	-	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan	1	97,15	-	-	-	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah	1	100,49	-	-	-	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	5	86,59	-	-	-	Tinggi
13.	Meningkatkan Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2	91,60	-	-	-	Sangat Tinggi
14.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	2	107,77	-	-	-	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama Bupati tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa 12 (dua belas) indikator sasaran atau sebanyak 85,71 % dalam kriteria Sangat Tinggi dan 2 (dua) indikator sasaran atau 14,28 % dalam kriteria Tinggi, dan 2 (dua) indikator sasaran belum diketahui hasilnya atau nilainya.

3.4 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Bagian ini akan menganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja disajikan per sasaran strategis, sebagai berikut :

Sasaran - 1

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 105,29 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Usaha Harapan Hidup (UHH)	$Ex = \frac{Tx}{Ix}$	Tahun	70,58	74,32	105,29
RATA -RATA CAPAIAN KINERJA						105,29

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Usaha Harapan Hidup (UHH)	70,58	70,60	70,66	70,69	74,32				105,29			

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan, Sasaran RPJMPD dan Perbandingan dengan Target Nasional Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Nasional 2025	Target Kinerja Sasaran
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,47	70,58
			Angka Kematian Ibu (AKI)	70 per 1000 Kelahiran hidup	44,25
			Angka Kematian Bayi (AKB)	12 per 1000 Kelahiran hidup	4,00
			Prevalensi	18,8 %	4,45

			Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita		
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,6 %	98,55
			Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	80 %	66,04
			Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk	2,56 per 1000 satuan penduduk	2,65
			Persentase Posyandu Aktif	93 %	80
			Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Case Detection Rate/CDR)	90 %	80,47

Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, diuraikan sebagai berikut :

1. Usaha Harapan Hidup (AHH)

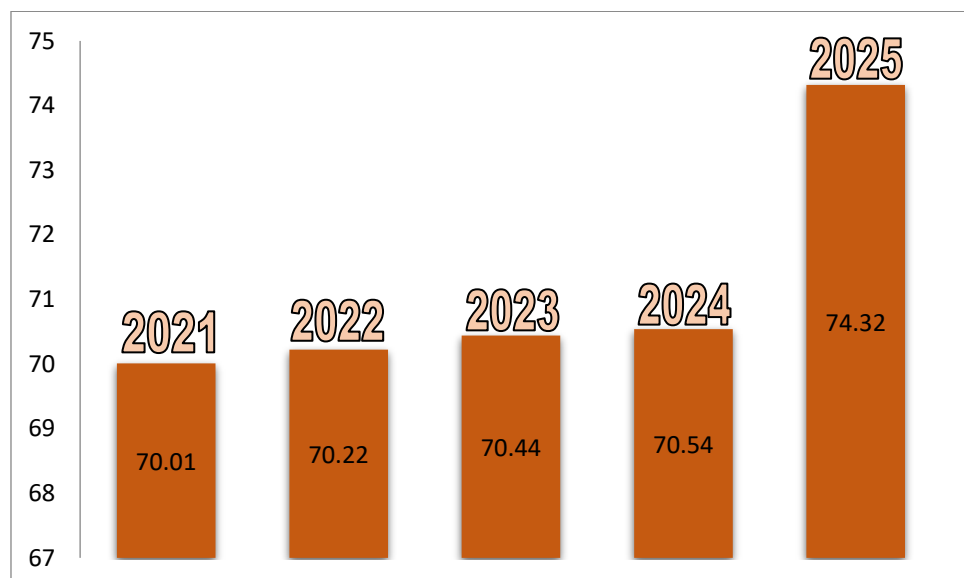
Tujuan dari pembangunan manusia di bidang urusan kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang dan sehat. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat, kesehatan masyarakat diantaranya adalah faktor lingkungan yang berpengaruh sebesar 60%, perilaku kesehatan sebesar 20%, pelayanan kesehatan sebesar 15%, dan keturunan sebesar 5%. Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup menunjukkan umur rata-rata yang akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Dalam analisis demografi angka harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting, karena merupakan satu bagian yang saling mendukung secara berbanding terbalik dengan angka kematian bayi yang merupakan probabilitas seorang bayi meninggal sebelum mencapai tepat umur 1 (satu) tahun.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tulang Bawang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2025 AHH sebesar 74,32 tahun, atau meningkat sebesar 3,78 tahun, jika dibandingkan dengan AHH pada tahun 2024, dimana pada

tahun 2024 AHH sebesar 70,54 tahun. Peningkatan AHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya. Peran faktor kesehatan ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi di masyarakat.

Meningkatnya usia harapan hidup berdampak pada peningkatan jumlah Lansia. Hal tersebut juga dibarengi dengan berbagai masalah dan kebutuhan bagi usia lanjut khususnya di bidang kesehatan. Oleh karena itu kelompok usia lanjut saat ini harus diupayakan untuk tetap mempunyai kondisi fisik dan mental yang prima. Dengan begitu lanjut usia tetap sehat, berguna dan berkualitas membangun negeri.

**Gambar 3.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025**



Sumber :

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Bawang

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus memberikan pelayanan bagi masyarakat, tidak hanya pembangunan infrastruktur, para lanjut usia juga tak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang salah satunya di dukung oleh adanya program/kegiatan berupa pemberian bantuan sosial bagi lansia, mengoptimalkan posyandu lansia maupun meningkatkan gizi lansia.

Pelayanan kesehatan di RSUD Menggala terus membaik dan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari terakreditasinya RSUD Menggala dengan Predikat Madya, status RSUD Menggala tipe B dan menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional III, adanya bangunan yang terintegrasi dan fungsional, tersedianya peralatan medis yang sesuai

LKJIP 2025

standar dan siap pakai, adanya tim Ponek serta meningkatnya kepuasan pelanggan. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat tersebut didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana kesehatan dan sumberdaya manusia dibidang kesehatan. Secara rinci banyaknya tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.18 Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2025

No.	Tenaga Teknis	Jumlah	Keterangan
1.	Dokter Umum	16	Orang
2.	Dokter Gigi	2	Orang
3.	Dokter Sub-Spesialis Hemato Onkologi	1	Orang
4.	Dokter Sub-Spesialis Obgyn	1	Orang
5.	Dokter Sub-Spesialis Radiologi Thorax	1	Orang
6.	Dokter Sub-Spesialis Nefrologi Hipertensi	0	Orang
7.	Dokter Sub-Spesialis Digestiv	1	Orang
8.	Dokter Sp. Penyakit Dalam	3	Orang
9.	Dokter Sp. Bedah	2	Orang
10.	Dokter Sp. Anak	4	Orang
12.	Dokter Sp. THT-KL	2	Orang
13.	Dokter Sp. Mata	2	Orang
14.	Dokter Sp. Radiologi	1	Orang
15.	Dokter Sp. Patologi Klinik	1	Orang
16.	Dokter Spesialis Anastesi	2	Orang
17.	Dokter Spesialis Paru	1	Orang
18.	Dokter Spesialis Syaraf	2	Orang
19.	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	Orang
20.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	2	Orang
21.	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	1	Orang
22.	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	Orang
23.	Dokter Spesialis Penyakit Mulut	1	Orang
24.	Dokter Spesialis Forensik	1	Orang
25.	Dokter Spesialis Jantung	2	Orang
26.	Dokter Spesialis Jiwa	1	Orang
27.	Dokter Spesialis Gizi	1	Orang
28.	Bidan	31	Orang
29.	Perawat	119	Orang
30.	Perawat Gigi	4	Orang
31.	Rehabilitasi Medik	4	Orang
32.	Analisis Kesehatan	13	Orang
33.	Analisis Transfusi Darah	0	Orang
34.	Pelaksana Apoteker	6	Orang
35.	Apoteker	8	Orang
36.	Pelaksana Radiografer	8	Orang
37.	Pelaksana RM	6	Orang
38.	Pelaksana Nutrisi	4	Orang
39.	Sanitarian	1	Orang
40.	Penata Anastesi	5	Orang
41.	Pelaksana Elektromedik	1	Orang
	TOTAL	268	Orang

RSUD Menggala telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Tipe B dan menjadi Rujukan Regional III yang meliputi 6 (enam) kabupaten di Lampung yaitu Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Hal ini menuntut agar RSUD Menggala dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau masyarakat, sehingga dapat mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dan sekitarnya yaitu dengan meminimalkan rujukan ke Rumah Sakit provinsi. Sampai dengan tahun 2025 pelayanan rawat inap RSUD Menggala telah memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 200 (dua ratus) tempat tidur, kapasitas tempat tidur RSUD Menggala selengkapnyanya dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.19 Kapasitas Tempat Tidur RSUD Menggala Tahun 2025

No.	RUANGAN	KELAS					Total Tempat Tidur
		VIP	1	2	3	Non Kelas	
1.	ICU					11	11
	Isolasi					1	1
	PICU					1	1
	HCU					7	7
2.	Sakura (Perinatologi)					9	9
	Ruang Isolasi					2	2
3.	Ruang Perawatan Kemoterapi					6	6
4.	Kemuning (Ruang Anak)			2	20		22
	Ruang Isolasi			2			2
5.	Kenanga (Geriatric)		4	6	8		18
	Ruang Isolasi			2			2
6.	Flamboyan (Ruang Penyakit Dalam+Bedah)				20		20
7.	Anggrek	4	24	16	4		48
	Ruang Isolasi				2		2
8.	Mawar (PONEK Sementara)		6	4	14		24
9.	Tulip (Perawatan Paru)				6	4	10
10.	Almanda (THT, Mata, Syaraf)				15		15
JUMLAH TEMPAT TIDUR		4	34	32	89	41	200

Sumber : RSUD Menggala

Sepanjang tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Menggala telah memberikan pelayanan kesehatan dengan perincian kunjungan pasien rawat inap sebanyak 8.176 Pasien turun sebanyak 348 Pasien dibanding Tahun 2024 sebanyak 8.524 pasien kemudian kunjungan pasien rawat jalan sebanyak

70.060 Pasien naik sebesar 3.590 Pasien dibanding Tahun 2024 sebesar 66.470 pasien. Kenaikan jumlah pasien dari Tahun lalu disebabkan pelayanan rumah sakit yang semakin membaik, dan masyarakat yang telah mengetahui keberadaan pelayanan di rumah sakit dari berbagai media khususnya media surat kabar dan TV lokal. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tersebut didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana kesehatan dan sumberdaya manusia dibidang kesehatan.

Salah satu bagian dari statistik rumah sakit adalah indikator pelayanan rawat inap rumah sakit. Indikator ini merupakan gambaran untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rawat inap di rumah sakit. Indikator kinerja RSUD Menggala tahun 2025 tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20 Indikator Pelayanan RSUD Menggala Tahun 2025

BOR (%)	LOS (Hari)	TOI (Hari)	BTO (Hari)	NDR (/1000)	GDR (/1000)
37,73	2,19	5,89	40,48	11,86	23,36

Sumber : RSUD Menggala

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa BOR (*Bed Occupancy Rate*) atau persentase rata-rata penggunaan tempat tidur dalam satu masa (1 tahun) sebesar 37,73%; LOS (*Length Of Stay*) atau rata-rata lama pasien selama 2,19 hari, TOI (*Turn Over Interval*) atau waktu rata-rata tempat tidur kosong/tidak ditempati selama 5,89 hari, BTO (*Bed Over Interval*) atau berapa kali tempat tidur ditempati pasien dalam satu tahun selama 40,48, NDR (*Net Death Rate*) atau angka kematian pasien lebih dari 48 jam perawatan sebanyak 11,86 dan GDR (*Gross Death Rate*) atau Angka kematian pasien kurang dari 48 jam perawatan sebanyak 23,36. Pembangunan urusan kesehatan juga menunjukkan keberhasilan dari beberapa indikator diantaranya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan. Implikasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 antara lain :

A) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusiatepat satu tahun. Angka KematianBayi (AKB) merupakan jumlahkematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB

menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Menurunkan angka kematian bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Kematian bayi di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 sebanyak 38 kasus dari 5.773 kelahiran hidup dengan penyebab kematian terbanyak adalah Gangguan sistem respirasi dan kardiovaskuler 30 kasus atau 19,24 %, BBLR dan prematuritas 4 kasus, kelainan kongenital 2, trauma lahir 1 dan tidak spesifik 1 kasus. Salah satu upaya pencegahan terjangkitnya penyakit tertentu yaitu Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) adalah melalui program imunisasi. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap, cakupan imunisasi dasar pada bayi di Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21

Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Kab Tulang Bawang

No	Jenis Imunisasi Yang Diberikan	Cakupan Imunisasi (%)	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Hepatitis B < 7 hari	1.183 (16,3)	95 %
2.	BCG	5.335 (73,7)	95 %
3.	DPT3 + HB3	5.175 (71,5)	95 %
4.	Polio	5.704 (78,8)	95 %
5.	Campak	5.503 (76)	95 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang

Selain itu cakupan desa/kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*), juga mempertahankan peningkatan sebesar 100,00 % pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar 100,00 %. UCI adalah gambaran suatu kampung/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di kampung/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang menyangkup 143 Kampung/Kelurahan dari 151 Kampung seluruhan, selain itu Kemajuan pada bidang kesehatan ditunjukkan pula oleh capaian cakupan pelayanan kesehatan pada tahun 2025 seperti cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang mencapai 90 %, Cakupan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan adalah sebesar 100 %, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) 69,5 %, Cakupan kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 91,00 %.

B) Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI (Angka Kematian Ibu) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) dipengaruhi berbagai faktor diantaranya status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik selama kehamilan serta kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang kurang optimal oleh masyarakat. Kematian ibu terkait erat dengan kondisi anemia masa kehamilan.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Tulang Bawang dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan pada tahun 2025 angka kematian ibudi Kabupaten Tulang Bawang sebesar 0,042 per 100.000 kelahiran hidup atau 2 kasus dari 5.773 kelahiran hidup, jika dibandingkan dengan tahun 2024 AKI di Kabupaten Tulang Bawang penurunan sebesar 0,042 per 100.000 kelahiran hidup atau 3 kasus dari 7.012 kelahiran hidup. hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Tulang Bawang berhasil dalam penanganan AKI melalui program-program yang telah dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI walaupun masih ada 2 kasus untuk kemudian menjadi bahan evaluasi kedepannya agar AKI kembali 0,000 Kasus. Pada Tahun 2025 juga telah dilakukan penguatan posyandu melalui pemberian insentif kepada kader posyandu untuk meningkatkan pelayanan kepada ibu, bayi dan balita.

C) Capaian ODF (*Open Defecation Free*)

Capaian ODF merupakan suatu kondisi pencapaian kelompok masyarakat dalam kehidupan bersanitasi yaitu tidak ada praktik buang air besar di sembarang tempat. Suatu keluarga telah dikatakan tidak melakukan praktik buang air besar sembarangan apabila

seluruh anggota keluarga telah buang air besar pada jamban sehat serta tidak ditemukan adanya keberadaan kotoran manusia di lingkungan sekitar. Pada tahun 2021 Kabupaten Tulang Bawang telah dinyatakan 100% ODF, hal ini berdasarkan data dari e-Monitoring Evaluasi (Monev) STBM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 17 November 2021 yang dibuktikan dengan Surat Kementerian Kesehatan Nomor KL.01.04/1/5584/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Umpan balik dan Apresiasi pencapaian Indikator SBS. Dengan hasil ini, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil mengubah kebiasaan masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun artinya sudah tidak ada lagi masyarakat Tulang Bawang yang buang air besar sembarangan dan sudah memenuhi syarat utama untuk verifikasi Kabupaten Sehat tahun 2021. Sejak Tahun 2023 Kampung yang menggunakan jamban keluarga yang ada di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 151 kampung. Jumlah kampung yang ada di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022 sebanyak 151 kampung, sehingga realisasi Jumlah Kampung ODF (Open Defecation Free) sebesar 100%.

D) Persentase Balita Stunting

Stunting dalam masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting bisa terjadi mulai dari dalam kandungan, bayi baru lahir (dengan panjang badan < 48 cm) sampai dengan anak usia 2 tahun Stunting merupakan salah satu program nasional. Kondisi balita stunting di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 berdasarkan data Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 5,40 % atau berhasil mengalami penurunan kembali sebesar 0,86 % dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,54 %. Capaian keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menanggulangi masalah gizi (stunting dan gizi buruk). Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang tiga tahun terakhir, terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 32,49 pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,40 %

Selain beberapa capaian seperti yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya seperti pemberian bantuan mobil ambulance gratis Pelayanan ambulan 24 jam pada tahun 2025 didukung dengan pengadaan ambulan kampung sebanyak 1 unit, dan sampai dengan tahun 2025 jumlah seluruh ambulan kampung ada 135 unit, 1 unit

ambulan puskesmas, 7 unit motor untuk pelayanan kesehatan keliling di wilayah puskesmas. Mobil ambulan digunakan untuk reaksi cepat pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bersifat darurat, yang dapat mengancam keselamatan jiwa pasien seperti ibu bersalin dengan resiko tinggi, pelayanan lansia, dan lain-lain. Bantuan berupa Anggaran sejumlah Rp. 4.998.094.000,- (DAK fisik dan Dinas Kesehatan). Bantuan Operasional Kesehatan berjumlah Rp. 30.150.325000,-

Mengembangkan Sistem Deteksi Tanggap TB Paru (SIDETAP) yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendeteksi penyakit tuberkulosis paru sejak dini sehingga dapat dilakukan pengobatan dan upaya untuk mencegah penularan. Pemberian insentif untuk seluruh bidan koordinator total sebesar Rp. 48.000.000,- intensif bidan desa total sebesar Rp. 271.800.000,- dan kader posyandu total sebesar Rp. 2.416.500.000,-

Sebanyak 6 (enam) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah :

- 1) Adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan peran posyandu dan peningkatan kualitas desa siaga aktif;
- 2) Tersedianya alokasi dana pelatihan dan in house training bersumber pada APBD pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- 3) Adanya komitmen semua jajaran RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk senantiasa berupaya
- 4) Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara menyeluruh;

- 5) Tersedianya dokter spesialis yang dapat dijadikan meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan SDM; sebagai narasumber pelatihan intern di RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 6) Tersedianya SDM Kesehatan yang profesional di bidangnya;
- 7) Tersedianya sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang mencukupi.
- 8) Kejelasan Tujuan dan Sasaran, Ketersediaan SDM, Anggaran Sarana dan Prasarana, Koordinasi, Perencanaan Monitoring dan Evaluasi serta partisipasi dukungan masyarakat guna memperoleh hasil yang maksimal.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,58	74,32	105,29
Rata-Rata Efektivitas				105,29	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.903.194.714,00	31.750.077.948,49	9,03 %
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.364.875.000,00	4.227.110.844,00	3,16 %
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	35.733.750,00	7.367.500,00	79,38 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.057.174.300,00	993.594.100,00	6,02 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	124.530.865.538,00	110.470.355.908,61	11,29 %
Rata-Rata Tingkat Efisiensi				11,12 %	

Sasaran - 2

“Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100,60 % dengan predikat **Sangat Tinggi**

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS^a = \sum_{i=a}^n \frac{E_i}{P_i} x^{F_k}$	Tahun	12,58	12,39	98,48
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = (7 \times P7 + 12 \times P13 + 15 \times P15 + 16 \times P16+) / P$	Tahun	7,69	7,90	102,73
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA						100,60

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,58	12,84	13,17	13,44	12,39				98,48			
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,73	7,77	7,82	7,90				102,73			

Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting terhadap terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat. Keberhasilan Pendidikan ditentukan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengguna jasa pendidikan tersebut (siswa, *stakeholder*, masyarakat). Sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, ditetapkan Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, diuraikan sebagai berikut :

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Capaian HLS penduduk usia 7 tahun ke atas tahun 2025 sebesar 12,39 Persen. Secara perlahan, HLS mengalami penurunan, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tulang Bawang sudah tumbuh dan relatif sesuai target yang sebesar 12,58 tahun untuk Tulang Bawang. Sudah optimalnya peningkatan HLS di Kabupaten Tulang Bawang diantaranya disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan juga motivasi keluarga yang mulai teratasi. Masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah cenderung memiliki minat terhadap pendidikan yang tinggi. Biaya transportasi dan biaya peralatan sekolah dianggap sudah dapat untuk diwujudkan. Selain itu tingkat kepercayaan terhadap lembaga pendidikan juga mempengaruhi motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dua hal tersebut berkolaborasi menjadi sebuah siklus, perekonomian yang sudah mulai berangsur berubah ditambah dengan tingginya motivasi belajar dari keluarga sehingga orang tua menginginkan anaknya **m e m e n t i n g k a n p e n d i d i k a n**. Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan HLS di Kabupaten Tulang Bawang diantaranya melalui upaya pemerataan akses pendidikan, sosialisasi wajib belajar secara terus

menerus, pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan, program-program bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) serta pemberian bantuan beasiswa bagi siswa miskin dari keluarga yang tidak mampu memberikan kesempatan yang luas bagi siapa pun untuk dapat menikmati pendidikan.

Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mendorong bertambahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang antar lain dengan memperbanyak Program Kejar Paket A dan B sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten, fokus penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan tenaga honorer pendidikan dan pembagian laptop untuk guru, selain itu perlu juga dilakukan dengan membuat perangkat atau aturan dan petunjuk teknisnya, untuk mendorong setiap warga Kabupaten Tulang Bawang yang berusia sekolah untuk bersekolah dan minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Selain indikator tersebut diatas, capaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, dimana tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan tingkatan sekolah yaitu tingkat SD/MI pada Tahun 2025 mencapai 110,50%, atau tidak ada perubahan dibanding Tahun 2024 yang juga sebesar 110,50%. Tingkat SMP/MTs tidak ada perubahan dari 82,41% pada tahun 2025 dan 82,41% pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan angka partisipasi kasar sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.10 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2024 - 2025**

No	Tingkatan Sekolah	Tahun (%)	
		2024	2025
1.	PAUD/TK/KB/RA	55,05	56,10
2.	SD/MI/Paket A	110,50	110,50
3.	SMP/MTs/Paket B	82,41	82,41

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Pada Tahun 2025 Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan tingkatan sekolah yaitu tingkat SD/MI mencapai 99,99%, dan tingkat SMP/MTs mencapai 83,41%, hal ini disebabkan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan pada usia sekolah dan banyaknya bantuan dari pemerintah dibidang pendidikan, sehingga meningkatkan APM pendidikan. Secara rinci perkembangan Angka Partisipasi Murni sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.11 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2024-2025**

No	Tingkatan Sekolah	Tahun (%)	
		2024	2025
1.	SD/MI	99,99	99,99
2.	SMP/MTs	82,41	83,41

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

Pada Tahun 2025 Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan kelompok umur 3-6 tahun mencapai sebesar 32,04%, kelompok umur 7-12 tahun mencapai sebesar 99,47%, kelompok umur 13-15 tahun mencapai sebesar 84,12%. Hal ini disebabkan disamping meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan juga karena semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan. Secara rinci perkembangan angka partisipasi sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2024-2025**

No	Kelompok Umur	Tahun	
		2024	2025
1.	3 – 6 Tahun	31,49	32,04
1.	7 – 12 tahun	99,98	99,47
2.	13 – 15 tahun	98,35	84,12

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan angka putus sekolah Angka Putus Sekolah, pada Tahun 2025 untuk jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 63 Orang (0,20%), Tingkat SMP/MTs sebanyak 9 Orang (0,69) faktor pembiayaan dan faktor anak berkebutuhan khusus yang menjadi penyebabnya.

Secara rinci perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :

**Tabel 3.13
Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2024-2025**

No	Tingkatan Sekolah	Tahun (%)	
		2024	2025
1.	SD/MI	78,80	63 Orang
2.	SMP/MTs	97,51	9 Orang

Sumber : Dinas Pendidikan Tulang Bawang

Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang juga tampak dari meningkatnya angka kelulusan pada semua jenjang pendidikan. Angka kelulusan ditunjukan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Angka Kelulusan pada tahun 2024/2025 berdasarkan tingkat sekolah yaitu tingkat SD/MI mencapai 100,00% dan tingkat SMP/MTs mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan semakin baiknya sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan serta kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Secara rinci perkembangan Angka kelulusan siswa sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Perkembangan Angka Kelulusan (AL)
Tahun 2023/2024 dan 2024/2025**

No	Tingkatan Sekolah	Tahun Ajaran (%)	
		2023/2024	2024/2025
1.	SD/MI	100,00	100,00
2.	SMP/MTs	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Tulang Bawang

Selain itu angka melanjutkan yang merupakan gambaran seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Kabupaten Tulang Bawang juga mengalami peningkatan. Angka melanjutkan pada tahun 2025 berdasarkan tingkat sekolah yaitu tingkat PAUD/TK ke SD/MI mencapai 100%, tingkat SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100,00% dan tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA belum mendapatkan data. Secara rinci perkembangan Angka melanjutkan siswa sebagai berikut :

**Tabel 3.15
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2024 - 2025**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun (%)	
		2024	2025
1.	PAUD/TK ke SD/MI	98	100,00
2.	SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00
3.	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

Pada Tahun 2025 daya tampung sekolah berdasarkan tingkatan sekolah yaitu daya tampung PAUD/TK mencapai 11.129 Siswa, SD mencapai 43.584 Siswa. Sedangkan tingkat SMP mencapai 18.031 Perkembangan daya tampung sekolah berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.16
Perkembangan Daya Tampung Sekolah Tahun 2024-2025**

No	Tingkatan Sekolah	Tahun	
		2024	2025
1.	PAUD/TK (Negeri dan Swasta)	574 Rombel	11.129 Siswa
2.	SD (Negeri dan Swasta)	1.995 Rombel	43.584 Siswa
3.	SMP (Negeri dan Swasta)	659 Rombel	18.031 Siswa

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

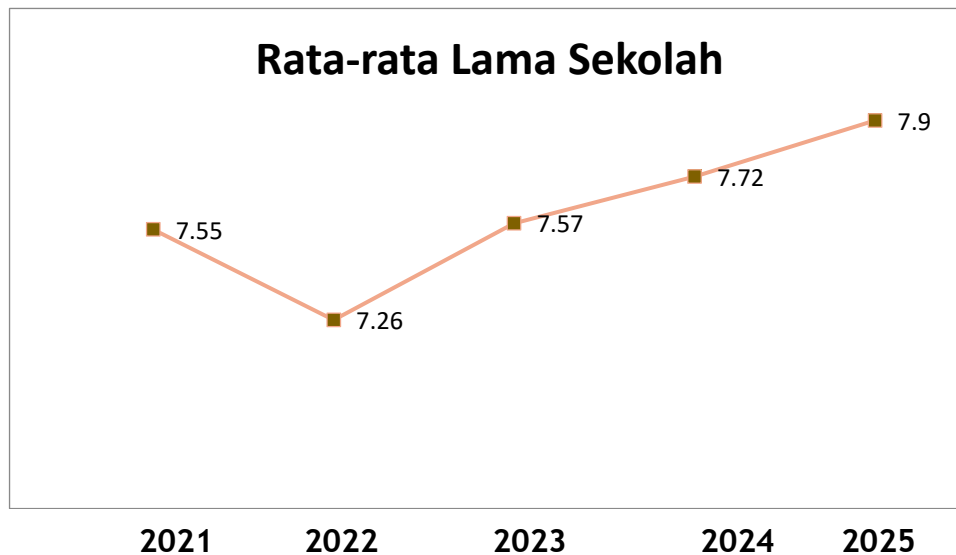
Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kabupaten Tulang Bawang Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan lain yang penting seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata Lama Sekolah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 adalah sebesar 7,90 persen naik sebanyak 0,18 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 7,72 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kabupaten Tulang Bawang dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP, sehingga untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih kerja keras lagi dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai Pekerjaan Rumah dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi

pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik.

**Gambar 3.1 Angka Rata-rata Lama Sekolah di KabupatenTulang Bawang
Tahun 2021 – 2025**



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

Berbagai capaian kinerja keberhasilan penyelenggaraan urusan pendidikan dikarenakan adanya berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 melalui Dinas Pendidikan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu sebanyak 417 orang siswa/i terdiri dari 264 orang siswa/i SD total sebesar Rp. 132.000.000,- /tahun dan 153 orang siswa/i SMP total sebesar Rp. 107.100.000,- /tahun; pemberian insentif untuk 900 orang tenaga guru honorer (Non PNS) total sebesar Rp. 900.000.000,-/tahun, 555 orang guru PAUD sebesar Rp. 416.250.000,-/tahun dan Pemberian Makanan Tambahan berupa Makan Bergizi Gratis kepada 81.084 Siswa.

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,58	12,39	98,49
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,90	102,7
Rata-Rata Efektivitas				100,59	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	3.221.906.492,00	3.026.587.548,00	6,06 %
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.580.005.362,00	70.276.928.470,00	1,82 %
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	34.832.000,00	12.503.000,00	64,11 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	15.250.000,00	12.538.000,00	17,78 %
Rata-Rata Efisiensi				22,44 %	

Tabel IKU yang mengacu pada RPJMD dan Perbandingan dengan Target Nasional

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Nasional 2025	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,30	12,58
			Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,07	7,69

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program-program yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas pendidikan dan Literasi masyarakat. Pada tahun 2025, sebanyak 4 (empat) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Pendidik;
- 4) Program Pengembangan Kebudayaan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dan Literasi masyarakat adalah :

- 1) Meningkatnya perhatian terhadap keberadaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Direktorat Jenderal PAUDNI melalui pemberian BOP PAUD (Bantuan Operasioanl Pendidikan);
- 2) Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah jenjang pendidikan SD dan SMP;
- 3) Adanya Wajar Dikdas 12 tahun yang mewajibkan semua penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan yang didukung adanya dana BOS dan Bantuan Siswa Miskin bagi Siswa Miskin Berprestasi;
- 4) Adanya program sertifikasi guru yang mensyaratkan pendidikan minimal S1 /D.IV bagi guru untuk dapat mengikuti program tersebut;
- 5) Kesadaran orangtua untuk mengikutsertakan anak mengikuti tambahan pelajaran diluar jam sekolah baik pada guru maupun lembaga bimbingan
- 6) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan;
- 7) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan yang cukup tinggi;
- 8) Penganggaran Pemerintah Daerah untuk capaian pemenuhan SPM Pendidikan;

- 9) Kerjasama/Kemitraan antara Satuan Pendidikan, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Masyarakat.

Sasaran - 3

“Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 102,12 % dengan predikat **Sangat Tinggi**

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Rumus Formulasi Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	$IKG = 1 (G_{kesehatan} \times G_{pemberdayaan} \times G_{tenaga\ kerja})$	Indeks	0,467	0,479	102,56
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA						102,56

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47	0,46	0,44	0,43	0,48				102,56			

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 nilai IKG Kabupaten Tulang Bawang sebesar 0,495, naik menjadi 0,498 pada tahun 2021, kemudian pada periode tahun 2022-2024 nilai IKG terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,48 pada tahun 2025. Penurunan nilai IKG di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan semakin membaik. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Tulang

Bawang terus mengalami peningkatan.

Di Kabupaten Tulang Bawang, semakin banyak perempuan yang memiliki akses untuk mengenyam pendidikan dengan lebih mudah dan merata. Pendidikan adalah fondasi utama untuk menciptakan kesetaraan, dan dengan peningkatan kualitas serta akses pendidikan untuk perempuan, masyarakat kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri dan berkontribusi lebih luas di berbagai bidang. Mulai dari pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi, perempuan di Tulang Bawang kini bisa mengaksesnya tanpa hambatan berarti. Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan kini mendominasi jumlah lulusan di tingkat perguruan tinggi, yang secara tidak langsung mengurangi ketimpangan dalam bidang akademis.

Dalam dunia kerja, perempuan semakin diakui kontribusinya, baik sebagai pekerja disektor formal maupun sebagai pelaku usaha. Program pemberdayaan ekonomi yang mendukung perempuan untuk mandiri secara finansial dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi telah memperlihatkan hasil yang sangat menggembirakan. Banyak perempuan di Kabupaten Tulang Bawang yang kini memimpin usaha mereka sendiri, baik itu usaha kecil, menengah, ataupun besar, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Berbagai pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, serta kebijakan yang mendukung perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan semakin memperkuat posisi perempuan dalam perekonomian lokal.

Selain itu, semangat pemberdayaan perempuan juga tercermin dalam dunia politik. Partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin, semakin meningkat. Perempuan di Kabupaten Tulang Bawang semakin aktif dalam organisasi-organisasi politik dan sosial, yang membuka peluang bagi mereka untuk mengambil peran lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Selain itu, partisipasi perempuan pada lembaga legislatif juga meningkat dari periode sebelumnya. Pada Tahun 2025 Jumlah penduduk umur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu sebanyak : 231.619 Orang dengan jumlah berjenis perempuan sebanyak 77.596 Orang, Jumlah Perempuan yang menjadi ASN sebanyak 4.126 Orang dan Legislatif sebanyak 10 Orang perempuan. Partisipasi aktif ini tidak hanya

mendukung kesetaraan gender, tetapi juga memperkaya kebijakan dengan perspektif yang lebih inklusif dan beragam.

Kesadaran masyarakat Kabupaten Tulang Bawang akan pentingnya kesetaraan gender juga mengalami perubahan positif. Banyak sekali program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Dengan meningkatnya pemahaman ini, ketimpangan yang dulu terlihat jelas di berbagai sektor mulai terkikis sedikit demi sedikit. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, semakin berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan mendapat hak yang setara dalam hal akses, perlindungan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kabupaten. Namun, meskipun penurunan IKG ini sangat menggembirakan, tantangan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih sempurna masih ada. Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi sepanjang Tahun 2025 terdapat 8 Orang yang mengalami KDRT, dan 39 Orang yang mengalami Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan juga beberapa hambatan seperti budaya patriarki yang masih kental, stereotip gender, dan kurangnya fasilitas yang mendukung perempuan untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan rumah tangga, masih perlu diatasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung program-program yang ada, baik dari segi kebijakan, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi, agar ketimpangan gender tidak hanya menurun, tetapi akhirnya bisa hilang sepenuhnya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) :

- 1) Peningkatan Program Bina Keluarga (Balita, Remaja, Lansia) dan Pusat Informasi Keluarga di Kabupaten Tulang Bawang;
- 2) Peningkatan Akses keluarga terhadap layanan sosial, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang;
- 3) Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis usaha mikro dan keterampilan rumah tangga;
- 4) Mendorong implementasi Kabupaten Layak Anak sebagai Komitmen perlindungan hak anak secara berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan melalui :

- 1) Penguatan peran perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan diberbagai tingkat pemerintahan;
- 2) Peningkatan kelembagaan layanan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM);
- 3) Peningkatan Program intervensi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak;
- 4) Mendorong implementasi Kabupaten Layak Anak sebagai Komitmen perlindungan hak anak secara berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

- 1) Ekonomi (Partisipasi angkatan kerja perempuan, akses ke pekerjaan layak);
- 2) Pendidikan (tingkat pendidikan perempuan vs laki-laki);
- 3) Kesehatan (Kesehatan reproduksi);
- 4) Politik dan pemberdayaan (perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan);
- 5) Sosial budaya (norma gender, stereotip), kebijakan hukum dan infrastruktur yang memadai semua aspek ini saling terkait untuk menciptakan kesetaraan gender.

Pada tahun 2025, sebanyak 8 (delapan) program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah, yaitu:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Persentase kecamatan yang melaksanakan PUG);
- 2) Program Perlindungan Perempuan (Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan);
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga);
- 4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (Persentase Kecamatan yang telah dilaksanakan pemenuhan hak anak);

- 5) Program Perlindungan Khusus Anak (Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak).
- 6) Program Pengendalian Penduduk
- 7) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 8) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak serta Daya Saing Kepemudaan adalah:

- 1) Peningkatan kesempatan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, memperoleh kesempatan berusaha, memperoleh pendidikan, serta berbagai sumber daya kehidupan;
- 2) Pengintegrasian dan pengimplementasian pengarusutamaan gender (PUG) kedalam dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan;
- 3) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengarusutamaan gender;
- 4) Telah dilakukan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,467 %	0,479 %	97,4%
Rata-Rata Efektivitas				97,4 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	100 %	69,2 %	30,8 %
Rata-Rata Efisiensi				30,4 %	

Sasaran - 4

“Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 78,48 % dengan predikat **Tinggi**

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	<i>Jumlah Organisasi yang Berprestasi/Jumlah Organisasi X 100 %</i>	Persen	24,68	19,37	78,48
RATA -RATA CAPAIAN KINERJA						78,48

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	24,68	27,12	29,45	32,08	19,37				78,48			

Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga, diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang Aktif

Kepeloporan pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara harus diutamakan agar pemuda memiliki semangat juang, kepekaan terhadap lingkungan, disiplin dan sikap mandiri serta memiliki sikap yang bertanggungjawab, inovatif, kreatif, ulet dan jujur. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan melalui berbagai organisasi kepemudaan seperti KNPI, OSIS, Pramuka, Karang Taruna maupun organisasi lainnya. Disamping itu keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan positif seperti kegiatan olahraga dan kegiatan sosial dapat mewujudkan pemuda yang lebih mandiri dan memiliki semangat kebangsaan.

Capaian indikator kinerja persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif pada tahun 2025 sebesar 78,48 % dari target sebesar 24,68 % terealisasi sebesar 19,37 %. Pada tahun 2025 sebanyak 41 organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dan sebanyak 12 Organisasi dinilai sangat berprestasi oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Jumlah kegiatan olahraga nasional yang diikuti 22 Cabang olahraga. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan berbagai upaya seperti pengembangan kapasitas dan kapabilitas kepemudaan serta mendorong peran aktif pemuda dalam berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kepariwisataan ini terlihat dengan jumlah pariwisata yang berjumlah 5 Destinasi yang tersebar diseluruh Kabupaten Tulang Bawang dan berkondisi sangat baik untuk keluarga yang ingin berwisata.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	30,75 %	29,26 %	95,15 %
Rata-Rata Efektivitas				95,15 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	47.000.000,00	36.815.000,00	21,67 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.570.238.000,00	1.036.598.400,00	33,99 %
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	95.000.000,00	4.560.000,00	95,20 %

		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	991.031.880,00	628.946.313,00	36,52 %
Rata- Rata Tingkat Efisiensi				46,84 %	

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program-program yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran daerah yaitu meningkatnya prestasi pemuda dan keolahragaan. Pada tahun 2025, sebanyak 4 (empat) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan adalah :

- 1) Adanya kerjasama antara Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), pelajar dengan lembaga pemerintah, aktivis dan lembaga kemasyarakatan;
- 2) Sinergitas pelaksanaan pembinaan pemuda;
- 3) Adanya upaya peningkatan kualitas pembinaan pemuda;
- 4) Adanya kerjasama antara lembaga yang terkait dengan pembinaan olahraga;
- 5) Sinergitas pelaksanaan pembinaan olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan dalam melaksanakan pelatihan dan penyelenggaraan event;
- 6) Berpartisipasi pada event-event olahraga baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional;
- 7) Peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan kreativitas remaja dan karya tulis ilmiah pemuda, gerakan pramuka dan karang taruna;

- 8) Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang sudah ada;
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan di wilayah kabupaten Tulang Bawang;
- 10) Adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam pembinaan karakter pelajar melalui olahraga.

Sasaran - 5

“Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 97,41 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Tingkat Kemiskinan	$Tingkat\ Kemiskinan\ (\%) = \frac{(Jumlah\ Penduduk\ Miskin / Total\ Populasi) \times 100}{\%}$	Persen	7,74	7,54	97,41
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA						97,41

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

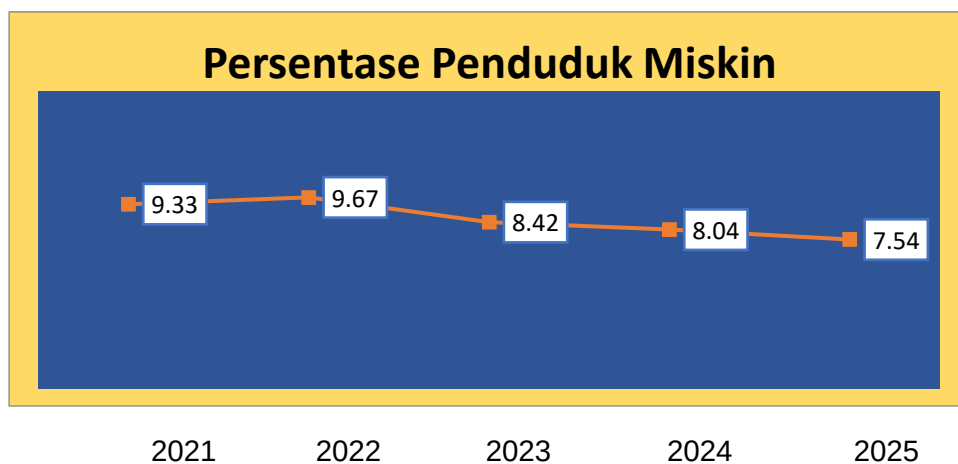
No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Tingkat Kemiskinan	7,50-8,18	7,50-8,18	6,90-7,67	6,68-7,39	7,54				97,41			

1. Tingkat Kemiskinan

Amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat menyatakan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari “memajukan kesejahteraan umum” masyarakat Tulang Bawang” dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, meningkatkan daya saing berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan sarana dan prasarana publik.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang, sejak Tahun 2013 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan Capain indikator persentase penduduk miskin pada tahun 2025 mencapai 7,54 % dengan garis kemiskinan sebesar 588.734 rupiah/kapita/Bulan.

Gambar 1.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021- 2025



Sumber : BPS Tulang Bawang Tahun 2025

Pengurangan angka kemiskinan setiap tahunnya menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan melalui program berkelanjutan antara lain : program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), program pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Ekonomi Kreatif, Program Keluarga Harapan (PKH) serta kegiatan-kegiatan pelatihan. Penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan jaminan sosial terhadap 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diharapkan memberi mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang.

Secara umum keberhasilan di bidang urusan sosial, dapat dilihat dari peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani. Hal ini disebabkan adanya program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanganan PMKS, seperti Program Keluarga Harapan, Pelayanan dan Jaminan Sosial Usia Lanjut, ASKESOS, Rehabilitasi bagi penyandang cacat berat, serta Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

**Tabel 3.30 Capaian Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial
Tahun 2024-2025**

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)	17.742	17.742
2.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) (PMKS) yang mendapatkan bantuan	1.570	60
3.	Jumlah PSKS yang aktif memberikan pelayanan sosial kepada PMKS		
	• TKSK	15	15
	• PSM	151	151

Sumber: Dinas Sosial

Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang didukung oleh keberadaan panti-panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll). Penanggulangan Masalah Sosial

bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah sosial dengan sasaran meningkatnya pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang sosial.

Tabel 3.31 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024-2025

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial (Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma)	124 Jiwa	236 Jiwa
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial (Pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial)	1.421 Jiwa	0
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial (Bimbingan sosial dan bantuan bagi KK miskin non potensial/ kesrakat dan lansia rentan sosial ekonomi)	1.421 Jiwa	0
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial (Penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat)	0	0
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi Lampung	0	64 Jiwa

Capaian SPM Bidang sosial tersebut diatas sangat dipengaruhi oleh Bantuan Alat Bantu Disabilitas : 236 Unit (Kursi roda 112 Unit, Tongkat 34 Unit, Alat Bantu Dengar 50 Unit, Kursi Roda Anak 40 Unit), Bantuan Langsung Tunai Sementara : 44.446 KPM, Program Keluarga Harapan : 15.599 KPM.

Tabel 3.32 Rekapitulasi Data Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tahun 2024-2025

No	Nama Program	Sumber Pendanaan	Jumlah Penerima	
			2024	2025
1.	BST Lansia dan Disabilitas	APBN	1.545 Jiwa	0 Jiwa
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	APBN	14.227 KPM	15.599 KPM
3.	Sembako	APBN	26.737 KPM	25.441 KPM

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2025

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,74 %	7,54 %	97,41 %
Rata-Rata Efektivitas				97,41 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.950.822.200,00	2.541.011.600,00	48,67 %
Rata-Rata Efisiensi				48,67 %	

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pada tahun 2025, sebanyak 1 (satu) program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis ini, terdiri:

- 1) Program Rehabilitasi Sosial;

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran adalah :

- 1) Adanya peluang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- 2) Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin

daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;

- 3) Melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan mengoptimalkan program/kegiatan yang bersentuhan langsung dengan keluarga tidak mampu disertai upaya verifikasi data dan validasi data keluarga tidak mampu
- 4) Memaksimalkan kinerja SDM yang dimiliki, Validnya data PPKS/PMKS dan tersedianya anggaran bagi penanggulangan PPKS/PMKS.

Sasaran - 6

“Meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 93,72 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur = $(\sum_{i=1}^n (Wi \times Ii))$	Persen	62,16	58,26	93,72
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA						93,72

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	62,16	64,66	66,02	68,91	58,26				93,72			

Pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pembangunan dan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Merata, diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indeks infrastruktur pekerjaan umum adalah ukuran komprehensif yang menilai kondisi infrastruktur dasar suatu daerah, seperti jalan, irigasi, drainase, permukiman, dan sarana prasarana transportasi. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja dan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, yang berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

a) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

Ketersediaan infrastruktur jalan saat ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Tulang Bawang. Pembangunan jalan diarahkan pada upaya penciptaan kemudahan aksesibilitas yang dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan terutama pada pusat- pusat pertumbuhan baru. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Panjang jalan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan kelasnya, pada tahun 2025 sepanjang 798,582 km dengan 181 ruas, sedangkan panjang jalan berdasarkan kondisi jalan mantap sepanjang 177,702 km, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memprioritaskan alokasi anggaran untuk infrastruktur khususnya infrastruktur jalan pada tahun 2025 seperti pemeliharaan rutin jalan, peningkatan dan pembangunan jalan, selain itu meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik juga disebabkan oleh adanya program-program pemberdayaan yang berbasis partisipasi dan swadaya masyarakat.

Meningkatkan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Tulang Bawang telah berdampak baik pada majunya perekonomian masyarakat setidaknya lancarnya akses transportasi, baik untuk memasarkan hasil bumi, perkebunan, pertanian dan lainnya.

b) Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi Baik

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian serta penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Untuk mendukung program nasional Nawa cita, dimana salah satunya memprioritaskan kebijakan dalam hal irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan distribusi yang dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan keandalan prasarana jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana jaringan irigasi serta pemeliharaan rutin dan berkala guna meningkatkan luas saluran irigasi di Kabupaten Tulang Bawang yang berfungsi dengan baik.

Sampai dengan tahun 2025 luas irigasi di Kabupaten Tulang Bawang seluas 564.637 Meter, sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik seluas 425.840 Meter, Kinerja pelayanan yang baik pada infrastruktur jaringan irigasi merupakan hasil dari kegiatan peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk terus meningkatkan luas irigasi dalam kondisi baik adalah keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* IPDMIP (PDMIP). IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasikewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

c) Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.

Sampai dengan tahun 2025 jumlah bangunan pemerintahan berjumlah 89 unit bangunan, dan sebanyak 83 unit bangunan dalam kondisi baik, Faktor yang mendukung keberhasilan meningkatnya persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan adalah perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga pengerjaan konstruksi di Tulang Bawang dapat selesai tepat waktu bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan, selain itu pemeliharaan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan (LPSE).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa Capaian kinerja berhasil mencapai 93,72 Persen untuk kualitas infrastruktur kewilayahan predikat Sangat Berhasil.

Tingkat Keseuaiannya dibagi 3 (tiga) diantaranya :

- a. Tingkat Tinggi (Idealnya 100 %) Pemanfaatan ruang sebagian besar sudah sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. **Tingkat sedang:** Pemanfaatan ruang sudah ada tetapi masih ada beberapa area yang belum sesuai.
- c. **Tingkat rendah (kurang dari 50%):** Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dianggap tidak berkualitas karena pelaksanaan pemanfaatan ruang banyak yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program-program yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah, Pada tahun 2025, sebanyak 6 (enam) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Penataan Bangunan Gedung
5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
6. Program Penyelenggaraan Jalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah :

- 1) Adanya pekerjaan pemeliharaan rutin dan berkala jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang guna memastikan kondisi jalan di kabupaten selalu baik;
- 2) Meningkatkan ketercukupan jumlah jalan kabupaten, meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten, peningkatan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, dan terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten (PJU, trotoar, marka, drainase jalan);
- 3) Meningkatkan ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi; partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi;
- 4) Adanya pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, sehingga dapat memperluas areal yang dapat dimanfaatkan untuk sawah;
- 5) Pelaksanaan pekerjaan sesuai aturan dan tepat waktu, optimalkan SDM yang ada, Sosialisasi kemasyarakat, koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait dan Komitemen Pimpinan;

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitas jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	28,00 %	22,25 %	79,47 %
2.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	75,50 %	75,42 %	99,89 %
3.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	72,37 %	72,37 %	100 %
4.	Meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	59,20 %	58,53 %	98,86 %
5.	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	54,25 %	53,29 %	98,23 %
Rata-Rata Efektivitas				95,29	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.087.183.800,00	7.215.377.105,37	10,78 %
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.322.706.000,00	7.376.756.451,38	11,37 %
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.249.355.000,00	1.248.540.750,00	0,07 %
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.466.888.855,00	15.387.684.465,33	11,90 %
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.385.967.600,00	5.305.806.254,65	16,92 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	57.191.443.615,00	52.548.282.538,61	8,12 %
Rata-Rata Efisiensi				9,86 %	

Sasaran - 7

“Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konektivitas Layanan Transportasi”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konektivitas Layanan Transportasi, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 127,90 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	IK1 = $(8 \times 1) / 22 = 0,36$ IK2 = $(4 \times 1) / 4 = 1$	Angka	0,43	0,55	127,90
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA						127,90

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,43	0,48	0,52	0,58	0,55				127,90			

1. Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio konektivitas kabupaten mengukur tingkat keterhubungan dan aksesibilitas antar wilayah di tingkat kabupaten, yang biasanya dihitung menggunakan indeks konektivitas yang menggabungkan berbagai moda transportasi. Indeks ini mempertimbangkan rasio jumlah trayek yang dilayani terhadap kebutuhan trayek, serta bobot untuk setiap jenis angkutan seperti jalan, sungai, danau, dan penyeberangan. Rasio ini membantu menilai seberapa efektif sebuah kabupaten terhubung dengan wilayah lain, yang penting untuk pergerakan barang, jasa, dan orang.

Transportasi memiliki peranan penting dan strategi dalam pembangunan nasional, mengingat transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi sebagai urat nadi kehidupan

ekonomi, sosial ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan memiliki dua fungsi ganda yaitu sebagai unsur penunjang dan sebagai unsur pendorong. Sebagai unsur penunjang, transportasi berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor dan menggerakkan pembangunan nasional.

Sebagai unsur pendorong, transportasi berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi, melayani daerah terpencil, merangsang pertumbuhan daerah tertinggal dan terbelakang. Selain itu, keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perhubungan antara lain :

- 1) Dipertahankannya kualitas teknis hasil pengujian kendaraan bermotor dengan tersedianya peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas, pada tahun 2025 jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 2.759 unit atau mengalami penurunan sebanyak 1.563 unit, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dimana jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan sebanyak 4.322 unit kendaraan (ganti buku atau perpanjangan);
- 2) Dari jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan di Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Daerah mulai Tahun 2024 dan seterusnya uji kendaraan bermotor tidak ada lagi biaya restribusi alias gratis;
- 3) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga mendapatkan sumbangan pendapatan dari Pos tempat khusus Parkir Kendaraan dan sumbangan dari Pos Pelabuhan masing-masing terealisasi sebesar Rp. 400.068.000,- dan 10.055.000,- dari target masing-masing Rp. 400.000.000,- dan 10.000.000,- keduanya melebihi target tahunan;
- 4) Jumlah Trayek yang dilayani sebanyak 12 Trayek (Angkutan jalan 8 Trayek dan Angkutan Sungai 4 Trayek);
- 5) Luas wilayah yang terlayani angkutan umum seluas : ± 1.200 km² meliputi Kecamatan : Menggala, Menggala Timur, Banjar Agung, Banjar Margo, Banjar Baru, Penawartama, Penawar Aji, Gedung Aji Baru, Meraksa Aji, Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan Gedung Meneng dan Dente Teladas;

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan Kabupaten	V/C Rasio (Volume/Capacity Rasio) di Jalan Kabupaten	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	100 %
2.	Meningkatnya keselamatan layanan angkutan sungai dan penyebrangan	Persentase Angkutan Sungai/Penyebrangan yang memenuhi Standar Keselamatan	65 %	66 %	101 %
Rata-Rata Efektivitas				100,5 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konektivitas Layanan Transportasi,	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.551.806.900,00	4.345.961.181,00	4,52 %
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20.500.000,00	14.547.600,00	29,04 %
Rata-Rata Efisiensi				16,78 %	

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program-program yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran daerah yaitu meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Konektivitas Layanan Transportasi,, Pada tahun 2025, sebanyak 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu :

Program Penyelenggaraan Jalan

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Pelayaran.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang terus meningkatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
2. Adanya Jalan Tol sehingga mengurangi Kemacetan Lalu Lintas dan cakupan pemerataan wilayah pelayanan transportasi;

3. Kondisi Infrastruktur dan Sarana pendukung transportasi, tingkat operasional aktivitas pergerakan transportasi yang semakin baik;
4. Sarana Pengujian yang telah Terakreditasi sehingga Dinas Perhubungan Tulang Bawang bisa melakukan pengujian kendaraan bermotor;
5. Adanya perencanaan yang jelas dengan target terukur, kerjasama dan koordinasi yang baik antar stakeholder terkait dan tersedianya sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Sasaran - 8

“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 104,50 % dengan predikat Sangat **Tinggi**.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	$g = \frac{PDBt - PDBt1}{PDB - 1} \times 100$	Persen	4,88	5,10	104,50
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA						104,50

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,88	5,25	6,00	6,40	5,10				104,50			

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah ukuran seberapa baik kinerja suatu perekonomian dalam hal ukuran keseluruhan dan produktivitas selama periode tertentu, seringkali satu tahun atau satu kuartal. Ini menunjukkan persentase perubahan total output perekonomian suatu negara selama jangka waktu tersebut. Pengukuran ini mencerminkan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pendapatan bagi warganya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan perekonomian mengalami ekspansi selama periode yang diukur. Hal ini sering kali berarti negara tersebut mengalami peningkatan aktivitas ekonomi dan output. Pertumbuhan ini sering kali menghasilkan tingkat lapangan kerja yang lebih tinggi, peningkatan standar hidup, dan peluang yang lebih besar bagi dunia usaha dan individu. Sebaliknya, tingkat

pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan kontraksi ekonomi yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, berkurangnya pendapatan, dan kesulitan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan mendasar bagi sebagian besar negara karena memungkinkan mereka meningkatkan kesejahteraan warganya dan berinvestasi di berbagai bidang seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini juga diawasi secara ketat oleh para pembuat kebijakan, dunia usaha, dan investor untuk mengambil keputusan yang tepat.

Laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulang pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 5,10 % dari target sebesar 4,88 % maka dapat disimpulkan capaian kinerja untuk Tahun 2025 tercapai sebesar 104,50 %.

Sasaran - 9

“Meningkatnya Investasi yang menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan, dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 93,09 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	$\frac{\text{Perolehan Aset Tetap} - \text{Pelepasan Aset Tetap}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja} \times 100 \%}$	Persen	34,80	34,09	97,95
2.	Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja} \times 100 \%}$	Persen	3,12-3,23	3,19	98,76
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah	$\frac{\text{Rasio Kewirausahaan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Persen	0,545	0,450	82,56
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						93,09

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	34,80	35,10	35,45	35,75	34,09				97,95			
2.	Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)	3,12-3,23	3,00-3,20	2,90-3,10	2,80-3,00	3,19				98,76			
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah	0,545	0,561	0,583	0,602	0,450				82,56			

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan dan bagaimana mewujudkannya merupakan fungsi utama hadirnya pemerintah. Tingkat kesejahteraan pada umumnya dilihat dari kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Untuk melihat gambaran kesejahteraan masyarakat maka indikator yang tepat digunakan adalah pendapatan perkapita. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 34,80 % dan terealisasi sebesar 34,09 % dengan demikian capaian kinerja tahun 2025 sebesar 97,95 %.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam upaya pemerintah daerah mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan semakin bertambahnya penduduk, maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke **LKJIP 2025**

tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang didominasi oleh penduduk usia produktif, maka ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator yang penting, di samping mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat usia produktif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kinerja Sangat Tinggi. Hal ini dilihat pada Tahun 2025 dari pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami capaian sebesar 98,76% dari target yang ditetapkan sebesar 3,12 -3,23% dan terealisasi sebesar 3,19 %.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Tulang Bawang antara lain, yaitu :

1. Faktor Keterbatasan Lapangan Kerja, Tulang Bawang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, namun lapangan kerja yang tersedia masih terbatas. Hal ini banyak lulusan sekolah dan universitas yang kesulitan mencari pekerjaan;
2. Faktor Kurangnya Keterampilan, banyak pencari kerja di Kabupaten Tulang Bawang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses ke pelatihan dan pendidikan yang berkualitas;
3. Faktor Infrastruktur yang belum mumpuni, Infrastruktur di Tulang Bawang masih belum mumpuni, sehingga sulit bagi investor untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja
4. Faktor Keterbatasan Akses ke Informasi, Banyak pencari kerja di Tulang Bawang tidak memiliki akses ke informasi tentang lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga mereka kesulitan memberi pekerjaan;
5. Faktor Keterlibatan Masyarakat yang Kurang, Keterlibatan masyarakat dalam program penurunan tingkat pengangguran terbuka masih kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program yang ada.

Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang ada di Tulang Bawang. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2025 sebanyak 239.345 jiwa naik sebanyak 4.000 dari tahun 2024 yakni sebesar 235.345 jiwa. Dengan naiknya jumlah angkatan kerja, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan. Sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 mencapai sebesar 71,53% atau naik sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar 71,47%.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya Investasi yang menyerap tenaga kerja dan mendorong kewirausahaan	Produktivitas tenaga kerja	99,00-100,00	99,01	100,00
		Tingkat Kesempatan kerja	95,50	71,53	74,89
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	46,35	46,35	100,00
		Persentase kampung mandiri dan maju di KTM Rawapitu	22,22	22,23	100,04
		Nilai SAKIP	70,00	75,00	107,14
Rata-Rata Efektivitas				96,41	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	732.446.518,00	669.253.682,00	8,63 %
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	245.000.000,00	116.345.200,00	52,51 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	227.578.200,00	208.511.500,00	8,38 %
Rata-Rata Efisiensi				23,17 %	

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memberikan bekal kompetensi bagi angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan rendah adalah dengan melakukan study kelayakan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan terus ditingkatkan kedepannya untuk mengurai angka pengangguran dan kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang, sehingga Balai Latihan Kerja dapat didukung Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat Keberhasilan capaian indikator menurunnya angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulang Bawang juga dipengaruhi oleh terus meningkatnya kapasitas dan kemampuan UMKM dalam menggerakkan perekonomian rakyat. UMKM memiliki potensi untuk menciptakan ekonomi baru di daerah melalui UMKM unggulan di daerah yang dapat meningkatkan aktivitas lokal sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi baru, menyerap tenaga kerja sehingga perekonomian di daerah berputar. Dengan berputarnya roda perekonomian di daerah-daerah maka akan membuat daerah tersebut menjadi produktif. Hal itu akan berdampak pada majunya perekonomian di daerah tersebut serta berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh upaya-upaya penguatan dan perluasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan sektor ini terbukti cukup signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

LKJIP 2025

maupun pendapatan per kapita yang digulirkan terus mengalami peningkatan selain itu berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sektor UMKM di Tulang Bawang mampu menyerap tenaga kerja hingga ribuan orang, hal menunjukkan sinyal bagus bagi tenaga kerja di Tulang Bawang karena semakin terbuka lebarnya peluang. Melihat besarnya peran UMKM bagi pembangunan ekonomi di Tulang Bawang, tak mengherankan jika UMKM menjadi lokomotif pembangunan, UMKM mampu menjadi solusi di tengah melonjaknya usia produktif akibat bonus demografi.

Untuk mendukung peran tersebut dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Koperasi dan UKM menyusun arah Kebijakan program pada urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil menengah melalui:

- 1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM);
- 2) Fasilitasi akses permodalan KUMKM;
- 3) Fasilitasi akses pemasaran Produk Koperasi.

3. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah adalah perbandingan antara jumlah wirausaha dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio ini merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi di daerah tersebut. Dengan menghitung rasio ini, pemerintah daerah dapat menganalisis perkembangan wirausaha dan merumuskan kebijakan untuk pengembangan ekosistem kewirausahaan yang lebih baik.

Fungsi dan kegunaan rasio kewirausahaan daerah :

- **Mengukur pertumbuhan ekonomi:** Rasio ini menjadi salah satu ukuran untuk menilai seberapa besar pertumbuhan wirausaha di suatu daerah, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara umum.
- **Menilai kemandirian ekonomi:** Rasio kewirausahaan juga menjadi tolok ukur kemandirian ekonomi suatu daerah, karena semakin tinggi rasionya, semakin besar kontribusi pelaku usaha terhadap perekonomian lokal.

- **Dasar perumusan kebijakan:** Data rasio kewirausahaan secara berkala digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk membuat kebijakan pengembangan ekosistem kewirausahaan yang efektif.

Membandingkan kinerja antar daerah: Rasio ini dapat digunakan untuk membandingkan capaian kewirausahaan antar daerah, sehingga dapat diketahui daerah mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal pengembangan wirausaha.

Upaya Pemerintah menumbuhkan minat Wirausahaan di Kabupaten Tulang Bawang adalah mempermudah mengurus izin usaha. Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan secara online di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang, hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan secara seragam, mudah, cepat dan transparan. Selain itu melalui pengurusan IUMK akan diperoleh database UMKM secara akurat Hal tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan SK Bupati Tulang Bawang Nomor 22 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat.

Berdasarkan ketentuan tersebut seluruh pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tulang Bawang diwajibkan untuk mengurus perijinan IUMK yang sekarang sudah berubah nama menjadi Nomor Induk Bersama (NIB) sebagai tanda legal formal usaha mereka. Sampai dengan tahun 2025, jumlah NIB yang telah diterbitkan di kecamatan se Tulang Bawang sebanyak 38.606, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Jumlah UKM Per Kecamatan Tahun 2023 s/d 2025

No.	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Banjar Agung	5.516	5.516	5.767
2.	Banjar Baru	1.675	1.675	1.686
3.	Banjar Margo	1.943	1.943	1.971
4.	Dente Teladas	1.459	1.459	1.485
5.	Gedung Aji	1.329	1.329	1.334
6.	Gedung Aji Baru	984	984	993
7.	Menggala	15.816	15.816	15.733
8.	Menggala Timur	2.021	2.021	2.022
9.	Meraksa Aji	531	531	530
10.	Penawar Tama	1.491	1.491	1.496

11.	Rawa Jitu Selatan	612	612	640
12.	Gedung Meneng	2.159	2.159	2.158
13.	Penawar Aji	1.809	1.809	1.812
14.	Rawa Jitu Timur	319	319	346
15.	Rawa Pitu	628	842	633
TOTAL		38.292	38.506	38.606

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap keberlangsungan para pedagang kecil dan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung UMKM sebagai garda terdepan dalam penguatan ekonomi rakyat. Dalam rangka fasilitasi akses pemodalan bagi usaha kecil dan menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersinergi dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyusun database bagi calon debitur dan debitur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan kredit program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sesuai dengan hasil evaluasi program KUR tahun 2014 yang masih kurang tepat sasaran, maka perlu disusun suatu aplikasi untuk mendorong ketepatan sasaran KUR, sehingga SIKP dapat menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi bank untuk penyaluran kredit yang efektif. Tahun 2025 total sebanyak 9.854 debitur dengan nilai total akad mencapai sebesar Rp . 466.195.455.835,-

Selain dari itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan bantuan peralatan penunjang usaha kepada pelaku usaha, mensosialisasikan penguatan modal bagi pelaku usaha semakin lebih ditingkatkan frekuensinya, fasilitasi akses permodalan terhadap pelaku usaha, promosi produk-produk usaha mikro baik tingkat lokal maupun nasional dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk melegalitaskan usahanya.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan Daerah	0,545 %	0,450 %	82,56 %
Rata-Rata Efektivitas				82,56 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	207.900.000,00	189.300.000,00	8,95 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00 %
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00 %
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	432.670.550,00	248.634.814,00	42,54 %
Rata-Rata Efisiensi				12,87 %	

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan. Pada tahun 2025, sebanyak 7 (tujuh) program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis ini, terdiri :

- 1) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA;
- 2) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL;
- 3) PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI;
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI;
- 5) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO

- (UMKM);
- 6) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING;
 - 7) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah sesuai potensi dan sumber daya unggulan daerah adalah :

- 1) Semakin baiknya peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan;
- 2) Meningkatnya kualitas teknologi, pendidikan dan pelatihan serta kemitraan kerjasama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang semakin baik.
- 3) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan, Akses Pembiayaan dan Permodalan, Infrastruktur dan Fasilitas Pelayanan serta Sinergi dan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan.

Sasaran - 10

“Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 97,15 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Nilai Indeks Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa Keseluruhan}} \times 100 \%$	Angka	0,7455	0,7243	97,15
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA						97,15

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Nilai Indeks Desa	0,7455	0,7605	0,7755	0,7905	0,7243				97,15			

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam dalam **lima status**, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Indikator yang digunakan untuk mengukur IDM di antaranya adalah Ketahanan Sosial yang mencakup variabel kesehatan, pendidikan, modal sosial: Ketahanan Ekonomi, dan; Ketahanan Lingkungan atau Ekologi. Untuk mengukur IDM masing-masing desa, prosedurnya adalah dengan memberikan nilai pada setiap indikator dengan skor antara 0 s.d. 5; makin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Setiap skor indikator dikelompokkan lagi ke dalam masing-masing variabel yang dirumuskan sebagai berikut:

Indeks Variabel = Σ Indikator X Nilai Maksimum X

Selanjutnya nilai indeks variabel dihitung dengan rumus di bawah ini yang kemudian hasilnya disebut sebagai nilai Indeks Desa Membangun.

$$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$$

- IDM Indeks Desa Membangun
- IS Indeks Sosial
- IEK Indeks Ekonomi
- IL Indeks Lingkungan (Ekologi)

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $< 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $< 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $< 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Persentase Kampung Mandiri

Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155. Realisasi capaian indikator persentase desa/kampung mandiri di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 sebesar 0,7243 dari target sebesar 0,7455, dari sebanyak 147 kampung, terdapat 33 kampung dengan status desa mandiri, 75 Kampung berstatus maju dan 39 Kampung berstatus berkembang. Selain itu persentase badan usaha milik desa yang aktif berjumlah 147 di Tahun 2025 dikarenakan Pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel, Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, kerjasama yang baik antara pemerintah kampung, lembaga kampung dan masyarakat dan pelayanan yang telah berbasis digital.

Keberadaan dan kiprah Tim Penggerak PKK telah diakui kebermanfaatannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. TP PKK juga memberikan harapan besar bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya **LKJIP 2025**

peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Jumlah kelompok PKK di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 147 kelompok yang tersebar di seluruh kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Adapun kegiatan yang direncanakan meliputi dasa wisma, posyadu, pembinaan tanaman obat keluarga, pemanfaatan pekarang untuk tanaman sayuran, pembinaan usaha ekonomi keluarga, serta pembinaan KB, dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan tujuan organisasi PKK yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera dapat terwujud.

Adapun capaian hasil pembangunan kampung dari Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.36 Hasil Pembangunan Dana Desa Tahun 2021-2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jalan Onderlagh	Meter	71.971	2.347	131.524	13.991	364
2	Jalan Aspal / Lapen	Meter	11.155		6.605	2991	6784
3	Rabat Beton	Meter	31.404		3000	13.361	17439
4	Pembukaan Badan Jalan / Jalan Tanah	Meter	105.288	3.663	15.476	15.804	5100
5	Jembatan	Unit	95		18	19	5
6	Drainase	Meter	42.417		10.389	13.507	9800
7	Irigasi	Meter	5.950	4.710	11.545	8820	-
8	Gorong-gorong	Unit	352	6		71	55
9	Tembok Penahan Tanah	Meter	1.701		467	643	9
10	Tambatan Perahu	Meter	23				-
11	Sumur	Unit	183	1	26	33	17
12	Perpipaan	Unit	86		15	4	1
13	MCK	Unit	85		6		8
14	Jamban Keluarga	Unit	5.847				0
15	PAUD	Unit	31		5		2
16	Polindes	Unit	11		1		0
17	Posyandu	Unit	35		19		14
18	Sarana olah raga	Unit	33			12	3
19	Taman bermain / Ruang terbuka Hijau	Unit	121	1			6
20	Pasar	Unit	20		3		0
21	Sarana Pariwisata	Unit	24				0
22	Gedung Bumdes	Unit	4				0

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
23	Balai Kampung	Unit	46				2
24	Jaringan Internet	Unit	31		2		0
25	Penerangan Jalan Umum	Unit	14.289			288	946
26	Sarana Pendukung Embung	Unit	11		1		0
27	Pengembangan Tanaman Ubi Kayu / Singkong	Hektar		31			2
28	Penanaman Sayuran	Paket		2			152
29	Pengadaan Bibit Tanaman	Unit		2			8
30	Perbaikan dan Pembuatan Kandang	Paket		3			49
31	Pengadaan Hewan Ternak	Ekor		107			19860

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Utama	Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya status desa mandiri di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Mandiri	Desa	0,7455	0,7243	97,15 %
Rata-Rata Efektivitas					97,15 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Utama	Kinerja	Target 2025	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya status desa mandiri di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Mandiri	Desa	14,82 %	22 %	1,48 %
Rata-Rata Efisiensi					1,48 %	

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kemandirian desa/kampung. Pada tahun 2025, sebanyak 1 (satu) program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis ini, yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kemandirian desa/kampung adalah :

- 1) Adanya Alokasi Dana Kampung yang dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan, serta membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru;
- 2) Kepatuhan dan Komitmen Pemerintah Daerah dan Kampung dalam melaksanakan Ketentuan Perundang-Undangan;
- 3) Tersusunnya penyusunan Dokumen Perencanaan yang baik sesuai peraturan;
- 4) Tercapainya keinginan bagi masyarakat kampung untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang diinginkan di dalam masyarakat desa;
- 5) Dukungan integrasi sistem dan teknologi informasi dan pembiayaan pendampingan aparat secara terus-menerus;
- 6) Tingkat solidaritas warga dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif semakin meningkat, Bumdes yang produktif dan kemampuan mengarahkan Dana Desa ke Program /Kegiatan secara langsung meningkatkan indikator IDM.

Sasaran - 11

“Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100,49 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	88,82	89,26	100,49
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA					

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Indeks Ketahanan Pangan	88,82	88,89	89,23	89,48	89,26				100,49			

Indeks Ketahanan Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya aman dan bergizi. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi mempengaruhi sistem pangan dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi 270,2 juta penduduk Indonesia, sehingga menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs) yaitu menghilangkan kelaparan (zero hunger) pada tahun 2030.

Penanganan permasalahan kerentanan pangan tidak hanya menjadi domain dari Badan Pangan Nasional tetapi juga membutuhkan peran aktif dari kementerian/lembaga lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Terlebih tantangan ketahanan pangan semakin besar dengan adanya isu-isu pangan global dan perubahan iklim. Upaya pembangunan pangan memang tidak mudah terutama di era Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA) seperti saat ini. Akan tetapi saya mengajak kita semua menjadi pemerintah yang agile, adaptive, dan open minded sehingga melalui sinergi bersama kita menjadi bagian dari problem solver.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Ketersediaan Pangan Utama, Energi dan Protein Perkapita Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Realisasi
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,50	90,50
2.	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton/Tahun	87,00	80,239
3.	Ketersediaan Energi Perkapita	Kalori/Hari	3,273	3.363,98
4.	Ketersediaan Protein Perkapita	Gram/hari	90,74	96,95

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah skor komposit yang mengukur kondisi ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. IKP digunakan untuk memeringkat ketahanan pangan wilayah secara relatif dan sebagai dasar untuk merencanakan intervensi program yang lebih efektif. Capaian Indeks Ketahanan Pangan di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mencapai angka yang sangat tinggi sebesar 89,26 dari target sebesar 88,82 dengan capaian rata-rata sebesar 100,49 Persen dan dapat diartikan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Tulang Bawang Sangat Baik.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Menurunnya pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan untuk meningkatkan skor pola pangan harapan	Pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan	4,88 %	4,88 %	100 %
Rata-Rata Efektivitas				100 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	232.142.000,00	29.373.000,00	87,35 %

		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	8.819.200,00	5.536.000,00	37,23 %
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	23.832.000,00	20.407.000,00	14,37 %
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	20.854.000,00	4.968.000,00	76,18 %
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	5.104.800,00	970.400,00	80,99 %
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.668.000,00	583.000,00	84,11 %
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	408.500.000,00	-	-
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.343.620.800,00	1.740.923.956,00	25,71 %
Rata-Rata Efisiensi				57,99 %	

Pada tahun 2025, sebanyak 8 (delapan) program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis ini, yaitu :

1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT;
2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
4. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
5. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
6. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
7. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

8. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah adalah :

- 1). Pola konsumsi masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
- 2). Pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan konsumsi yang berkualitas
- 3). Keterjangkauan distribusi konsumsi kepada masyarakat
- 4). Tersedianya akses air bersih yang telah memadai bagi masyarakat

Sasaran - 12

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital, dengan 5 (lima) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 86,59 % dengan predikat **Tinggi**.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP)	$\sum (\text{Skor Komponen } X \text{ Bobot Komponen})$	Skor	63,00	60,23	95,60
2.	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	$(\text{Skor Dimensi} \times 0,15) + (\text{Skor D2} \times 0,20) + (\text{D3} \times 0,15) + (\text{Skor D4} \times 0,200) + (\text{Skor D5} \times 0,15) + (\text{Skor D6} \times 0,15)$	Indeks	69,50	54,91	79,00
3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	$\sum \text{sum of (Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Bobot per unsur)} / \text{Jumlah responden}$	Skor	4,61	3,71	80,47
4.	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP	Penyediaan Data, Penilaian Berbasis Indikator, Verifikasi dan Skor Akhir	Indeks	93,04	84,96	91,31
5.	Indeks Pemerintah Digital (Indeks PemDi)	$\sum (NDj \times BDj)$	Indeks	0,60	.*	.*
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA						86,59

Keterangan :

*No. 5. Hasil Indeks Pemerintah Digital (Indeks PemDi) Belum dilaksanakan sehingga belum terdapat nilai.

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP)	63,00	66,00	70,00	75,00	60,23				95,60			
2.	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	69,50	70,22	71,46	72,38	54,91				79,00			
3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,61	4,72	4,83	4,94	3,71				80,47			
4.	Indeks Pencegahan	93,04	93,88	94,27	94,4	84,96				91,31			

	Korupsi Daerah (IPKD) MCP												
5.	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDa)	0,60	0,65	0,70	0,75	-				-			

Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel, diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan pada tanggal 28 Desember 2025. Perolehan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 adalah **60,23** dengan predikat “B”. Jika dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2024 dengan nilai 61,00 capaian pada tahun 2025 mengalami penurunan nilai Skor kembali sebesar 0,77 Persen yang menunjukkan implementasi SAKIP masih perlu ada sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Walaupun belum memenuhi target untuk Tahun 2025 sebesar 63,00 sesuai dengan target yang ada dalam IKU Kabupaten Tulang Bawang 2025-2029. Namun hasil tersebut sudah mendapatkan capaian kinerja yang sangat baik yaitu sebesar 95,60 Persen naik dari Tahun lalu sebesar 93,05 persen.

2. Indeks Pengelola Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang ditetapkan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan enam dimensi utama yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2020. Tujuan utamanya adalah mendorong pemerintah daerah agar memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ukuran yang ditetapkan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan enam dimensi utama yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2020. Tujuan utamanya adalah mendorong pemerintah daerah agar memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 terealisasi sebesar 54,91 dengan predikat B (Cukup Baik) dari target sebesar 69,50 % dengan demikian Indeks Pengelola Keuangan Daerah mendapatkan Capaian Kinerja sebesar 79,00 %.

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah sebuah indeks untuk mengukur kualitas dan kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia IPP dirancang sebagai alat evaluasi untuk menilai enam aspek utama, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Nilai IPP diperoleh melalui evaluasi sistematis untuk memastikan pelayanan yang diberikan sudah baik dan memuaskan masyarakat.

Aspek-aspek yang dievaluasi

- ☐ **Kebijakan Pelayanan:** Kesesuaian pelayanan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
- ☐ **Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM):** Kinerja, kompetensi, dan etika aparatur sipil negara.
- ☐ **Sarana Prasarana:** Ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung pelayanan.
- ☐ **Sistem Informasi Pelayanan Publik:** Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pelayanan.
- ☐ **Konsultasi dan Pengaduan:** Mekanisme dan efektivitas dalam menangani pertanyaan dan keluhan masyarakat.

Inovasi Pelayanan: Kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan inovasi yang meningkatkan kualitas layanan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) untuk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 diperoleh sebesar 3, 71 dengan Predikat B- dengan target sebesar 4, 61. Dengan demikian Realisasi Kinerja yang diperoleh sebesar 80,47 dengan predikat Baik. Dinas yang dinilai adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan komponen yang dinilai

meliputi : Kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, SIPP, konsultasi pengaduan dan inovasi.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Utama	Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	Indeks Publik	Pelayanan	4,61 %	3,71 %	80,47 %
Rata-Rata Efektivitas					80,47 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Utama	Kinerja	Target 2025	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	Indeks Publik	Pelayanan	100 %	70 %	30 %
Rata-Rata Efisiensi					30 %	

4. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan antara lain melalui implementasi pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi. Dalam mewujudkannya perlu adanya komitmen bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola dan melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penajaman indikator sehingga diharapkan mendorong efektivitas untuk menurunkan tingkat korupsi maka KPK telah melakukan beberapa evaluasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring Center for Prevention yang selanjutnya disebut sebagai IPKD MCP.

Terkait Pelaksanaan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan surat Inspektur No : B/700.1/95-a/III/TB/I/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Hal : Penyampaian Data Target dan Realisasi IKU Inspektorat Tahun 2025, Terealisasi sebesar 84,96 % dari target sebesar 93,04 % dengan demikian realisasi kinerja tercapai sebesar 91,31 %.

5. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)

Indeks pemerintahan digital adalah ukuran yang mengukur tingkat kematangan dan kinerja penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau digital governance suatu negara atau daerah. Indeks ini menilai sejauh mana pemerintah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara, mulai dari penyediaan layanan, infrastruktur, hingga kapasitas manusia dan ekonomi.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan SPBE untuk tahun 2025 dengan target sebesar 3,28 Persen dan sudah terealisasi sebesar 3,38 Persen dan terkait Indeks Pemerintahan Digital (PemDi) berdasarkan surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Nomor : B/000.8.6.3/54/V.11/TB/II/2026 Tanggal 2 Februari 2026 Hal : Penyampaian Data Bahan Penyusunan LKjIP Kabupaten 2025 menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum melaksanakan Indeks Pemerintahan Digital (PemDi) dan akan melaksanakannya di Tahun 2026.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah :

1. Adanya komitmen Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah dalam mendukung percepatan implementasi Indeks Pemerintahan Digital (PemDi);
2. Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai, termasuk jaringan, server dan pusat data;
3. Peningkatan kapasitas SDM TIK, baik melalui pelatihan maupun pendampingan teknis;
4. Adanya pendampingan di BPKP Perwakilan Provinsi;
5. Adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah;

6. Kualitas Sasaran, kemampuan, kompetensi, motivasi, komitmen, perencanaan yang matang dan manajemen waktu yang baik.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program-program yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan berbasis digital. Pada tahun 2025, sebanyak 4 (empat) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu :

- 1) Program Aplikasi Informatika;
- 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- 3) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 4) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sasaran - 13

“Meningkatnya Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 91,60 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14

No.	Indikator Kinerja	Formulasi cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan/Dikembangkan	<i>CB dilestarikan / CB Total CB yang diidentifikasi</i>	Persen	38,46	32,00	83,20
2.	Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani	<i>Jumlah Potensi Konflik ditangani / jumlah total potensi yang terjadi X 100%</i>	Persen	100,00	100,00	100,00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA						91,60

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan / Dikembangkan	38,46	42,31	46,15	50,00	32,00				83,20			
2	Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			

1. Persentase cagar budaya yang dilestarikan/dikembangkan

Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang pelestarian cagar budaya, cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan (berupa Benda Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya) di darat

LKJIP 2025

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Yang perlu digarisbawahi dari pengertian cagar budaya ini yaitu sasarannya yang bersifat kebendaan; jenis objek, bangunan, struktur, situs, dan kawasan; lokasinya berada di darat dan/atau di air; memiliki nilai yang melekat dan penting untuk masa kini dan yang akan datang. Kemudian, yang juga penting adalah penetapannya melalui proses yang berjenjang.

Ketika sebuah objek belum memenuhi proses ini, maka ia masih dikategorikan sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB). Bila benda ini hanya berusia tua semata dan diidentifikasi belum memiliki nilai penting yang melekat padanya, maka disebut dengan Tinggalan Purbakala atau Temuan Arkeologis. Ada juga yang disebut dengan Satuan Ruang Geografis yang Tidak Memenuhi Kriteria Cagar Budaya, tetapi karena memiliki arti khusus bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, maka dapat diusulkan sebagai cagar budaya melalui proses penelitian. Arti khusus tersebut dapat berupa simbol pemersatu, kebanggaan, dan jati diri bangsa, atau yang merupakan suatu peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia. Contohnya, Monumen Nasional di Jakarta dan kapal terdampar akibat peristiwa tsunami di Banda Aceh.

Jenis objek cagar budaya terbagi menjadi 5 jenis yaitu:

1. Benda Cagar Budaya, berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
2. Bangunan Cagar Budaya, didefinisikan sebagai susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap
3. Struktur Cagar Budaya, yaitu susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia

4. Situs Cagar Budaya, diartikan sebagai lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu
5. Kawasan Cagar Budaya, merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas

Penetapan Objek Cagar Budaya harus melalui persetujuan yang dibuat oleh kepala daerah atau menteri. Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka wajib dilestarikan bersama. Proses pelestarian ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, dimana ketiganya dilaksanakan dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Objek Cagar Budaya juga perlu kita lindungi keaslian serta keutuhannya sehingga tidak rusak dan masih bisa terus dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Namun, bila hanya dilindungi tanpa dikembangkan serta dimanfaatkan, maka sebuah Objek Cagar Budaya menjadi sia-sia keberadaannya. Masyarakat bisa memanfaatkan sebuah Objek Cagar Budaya, seperti bangunan Candi Borobudur di Magelang atau Kawasan Kotagede di Yogyakarta yang dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah hingga menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Secara akademis, juga bisa dikembangkan sebagai sumber primer untuk meneliti kehidupan di masa lalu, sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kehidupan nenek moyang kita di era sebelumnya.

Persentase cagar budaya yang dilestarikan/dikembangkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 38,46 % dan terealisasi sebesar 32,00 % dengan demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil melestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memiliki 200 Grup Kesenian yang sudah terdaftar aktif di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program-program yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran daerah yaitu Meningkatkan Pelestarian/Pengembangan Budaya Daerah. Pada tahun 2025, sebanyak 1 (satu)

program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu :

1) Program Pengembangan Kebudayaan;

Keberhasilan capaian indikator tersebut salah satunya dipengaruhi sejarah kebudayaan dan perdagangan Tulang Bawang yang digambarkan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, disamping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara sehingga nilai-nilai tradisi kebudayaan masih kental akan warisan nenek moyang.

Meningkatnya apresiasi masyarakat pada pemerintah daerah terhadap seni budaya daerah dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan acara yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik dalam acara peringatan hari-hari besar maupun acara-acara adat. Kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang sangat banyak ragamnya, hal ini disebabkan penduduk Kabupaten Tulang Bawang berasal dari berbagai suku dan daerah yang masing-masing tetap mempertahankan dan melestarikan kesenian dan kebudayaan dari daerah asal, seperti wayang kulit dari daerah Jawa Tengah, Jaipong dari daerah Sunda, Reog dari Daerah Ponorogo, dan lain-lain sesuai asal daerah. Meskipun demikian banyak masyarakat pendatang yang mempelajari kesenian dan kebudayaan asli lampung, seperti tari-tarian khas lampung maupun gamelan/musik khas lampung. Demikian juga sebaliknya banyak penduduk asli lampung yang mempelajari kesenian dan kebudayaan dari daerah lain. Hal ini dapat dilihat pada saat pawai/karnaval seni dan budaya daerah yang diselenggarakan pada acara peringatan Hari Ulang Tahun RI ataupun Hari Jadi Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan/ dikembangkan	38,46 %	32,00 %	83,20 %
Rata-Rata Efektivitas				83, 20 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan/ dikembangkan	15.250.000,-	12.538.000,-	17,78 %
Rata-Rata Efisiensi				17,78 %	

2. Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang Ditangani

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Capaian indikator persentase penurunan konflik sosial di masyarakat juga didukung dengan adanya program/ kegiatan berupa pemberian insentif bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta penguatan kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Secara umum keberhasilan pembangunan di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilihat dari kerukunan hidup antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, tumbuh dan berkembangnya organisasi masa, LSM dan Partai Politik di Masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dapat dilihat dari perkembangan jumlah LSM, Ormas dan Parpol yang terdaftar secara resmi di pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2025 jumlah LSM yang terdaftar

sebanyak 5 kelompok, Organisasi Masyarakat 12 organisasi, serta Partai Politik peserta pemilu sebanyak 18 parpol.

Tabel 3.7 Perkembangan Jumlah LSM, Ormas, OKP dan Parpoldi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024-2025

No	Jenis Lembaga	Tahun	
		2024	2025
1.	Lembaga Swadaya Masyarakat	11	5
2.	Organisasi Masyarakat	36	12
3.	Lembaga Adat	1	0
4.	Organisasi Profesi	4	0
5.	Lembaga Yayasan	4	0
6.	Partai Politik	18	18

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Selain itu juga sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada para Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah ikut serta menjaga keamanan dan kondusifitas di Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memberikan insetif kepada 161 orang anggota Babinsa dan 99 orang anggota Bhabinkamtibmas.

Secara umum keberhasilan-keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan dan kedewasaan demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang, dimana masing-masing organisasi tersebut memiliki pendapat dan pemahaman yang berbeda dalam mensikapi perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat maupun dalam mensikapi atas kebijakan pemerintah daerah.

❖ Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

a. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Adapun sumber daya yang diukur dalam hal efektivitas adalah sumber daya manusia. Berikut disampaikan analisis atas Efektifitas

penggunaan Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulang Bawang untuk Tahun Anggaran 2025.

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani	100 %	100 %	100 %
Rata-rata efektivitas					100,00 %	

b. Efisiensi

Efisien adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya. Adapun sumber daya yang diukur dalam hal efisiensi adalah sumber daya materil berupa Anggaran. Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulang Bawang untuk Tahun Anggaran 2024.

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani	100 %	92,62 %	7,38 %
Rata-rata efisiensi					7,38	%

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program-program yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran daerah yaitu meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2025, sebanyak 4 (empat) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

- 3) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 4) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
- 6) Program Pengembangan Kebudayaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

- 1) Adanya penyuluhan-penyuluhan masalah hukum, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang maupun kerjasama dengan instansi hukum terkait;
- 2) Adanya kesadaran masyarakat yaitu perlu adanya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berkerjasama integrasi dengan instansi terkait di wilayahnya masing-masing;
- 3) Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Satpol PP dan Linmas;
- 4) Meningkatnya peranan forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Etnis, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, pemberian insentif Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), lomba siskamling dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menyadarkan masyarakat tentang arti dari pada kerukunan, sehingga bisa menekan angka tindak kekerasan dan konflik yang ada di masyarakat.
- 5) Melakukan pembinaan terhadap kelompok seni yang ada di Kabupaten Tulang Bawang baik yang sudah berjalan maupun kelompok seni yang baru;
- 6) Mengadakan lomba-lomba dan pentas kesenian tingkat Kabupaten Tulang Bawang yang diikuti oleh grup kesenian yang ada di Tulang Bawang dan perwakilan sekolah-sekolah;

- 7) Adanya pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 8) Adanya upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda dengan memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event-event baik yang berskala kecamatan, kabupaten maupun nasional
- 9) Tersedianya SDM yang mumpuni, Pariwisata adalah bidang unggulan, Keanekaragaman seni dan budaya daerah, banyaknya situs peninggalan dan dukungan pemerintah terhadap Budaya di Tulang Bawang.

Sasaran - 14

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 107,77% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.37 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Cara Perhitungan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Indeks	65,61	70,71	107,77
2.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	$(R) = \text{Bahaya (Hazard)} \times \text{Kerentanan (Vulnerability)} / \text{Kapasitas (Capacity)}$	Indeks	81,91	.*	.*
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA						107,77

Keterangan : *Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) belum dapat dikeluarkan karena belum terbit dari BNPB

Perbandingan Capaian target Jangka Menengah dari Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Rencana Jangka Menengah PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,61	65,86	66,12	66,37	70,71				107,77			
2.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	81,91	81,26	80,61	79,97								

Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup, diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadialah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan tiga

parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Vegetasi Formula perhitungan IKLH berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016P tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (\text{Indeks Kualitas Udara} \times 30\%) + (\text{Indeks Kualitas Air} \times 30\%) + (\text{Indeks Tutupan Lahan} \times 40\%)$$

Pada tahun 2025 Indeks kualitas Udara (IKU) 76,40, Indeks Kualitas Air (IKA) , 73,32 dan Indeks Tutupan Lahan/Hutan dengan nilai 55,69, sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 terealisasi sebesar 70,71%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulang Bawang mengalami kenaikan sebesar 3,85 % dimana pada tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulang Bawang sebesar 66,86 % Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dipengaruhi oleh perbaikan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Lahan.

Indeks Kualitas Udara dinilai sangat penting karena berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang menghirup udara secara langsung. Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Tulang Bawang masih baik meskipun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas udara seperti semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor dapat memberikan kontribusi negatif. Kondisi masih banyaknya pepohonan, pertanian, dan perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang merupakan faktor untuk menjaga kualitas udara. Sedangkan untuk air, masih diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, peningkatan kesadaran masyarakat dengan turut menjaga kebersihan lingkungan, mempengaruhi perbaikan kualitas air di Kabupaten Tulang Bawang. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh limbah atau sampah yang dibuang ke sungai atau perairan.

Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022 belum cukup baik, dimana dari data status mutu air sungai tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan mayoritas air sungai di Kabupaten Tulang Bawang berstatus sedang, akan tetapi kriteria penilaian prestasi kinerja masih tinggi. Hal ini merupakan hal yang wajar

LKJIP 2025

mengingat Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum seluruhnya memenuhi baku mutu. Tingginya konsentrasi *Fecal Coli* dan *Total Coli* pada air sungai di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak melakukan BAB di sungai masih cukup rendah. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu.

Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu dan menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Dalam rangka meningkatkan semangat kegotongroyongan dimana salah satu kegiatannya berupa kerja bakti untuk mewujudkan Tulang Bawang yang bersih indah dan nyaman, kegiatan ini juga diharapkan akan memotivasi masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk berbuat yang sama, dan harapannya sebagai kebiasaan atau habit warga masyarakat Tulang Bawang. Produksi sampah Kabupaten Tulang Bawang per tahun 2025 sebesar 64,245,84 ton/Tahun atau turun dibandingkan Tahun 2024 sebesar 65.787,6 ton/tahun dan volume sampah yang diangkut ke TPA sebesar 6.821,85 ton/Tahun untuk Tahun 2025 dan untuk Tahun 2024 sebesar 4.336,20 ton/tahun. Untuk mengangkut sampah Kabupaten Tulang Bawang ke TPA Panca Mulya dilakukan dengan menggunakan 4 unit dump truck, 3 unit mobil pick up dan 8 unit container sampah. Selain itu untuk membantu pembersihan sampah dilakukan dengan pasukan serba guna dan 2 unit motor sampah.

Untuk penyapuan jalan di Kabupaten Tulang Bawang sampai Tahun 2025 dilakukan oleh 94 orang tenaga penyapuan dan termasuk tenaga pasukan yang bekerja pada ruas jalan, yang harus dilayani penyapuan sepanjang Jalan Cendana, Jalan Cemara, Komplek Perkantoran, Jalan Tangga Raja, Komplek Rumah Dinas 50 dan Jalan Raya Gunung Sakti. Degradasi lingkungan di sebagian wilayah perkotaan Indonesia semakin parah. Hal ini ditandai oleh makin meningkatnya suhu udara di atas perkotaan, penurunan muka air tanah, pencemaran air tanah, udara, dan suara (bising), amblasan

permukaan tanah, intrusi air laut, abrasi pantai, suasana gersang dan terjadinya tekanan psikologis penghuninya. Kurangnya apresiasi akan pentingnya RTH, serta lemahnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan kota menyebabkan kuantitas dan kualitas RTH semakin berkurang. Melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tulang Bawang berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH. Kegiatan ini merupakan usaha dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam peningkatan kualitas lingkungan dan tata ruang dengan penataan menjadi ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai area bersosialisasi/bermasyarakat dan sumber oksigen dalam kota. Untuk Tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menanam tanaman sebanyak 404 Batang yang tersebar di lingkup Pemda Menggala. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan RTH, kegiatan ini merupakan penunjang penataan ruang terbuka hijau, dimana kondisi ruang terbuka hijau yang sudah ditata butuh pemeliharaan secara berkala untuk menjaga fungsi maupun meningkatkan fungsinya.

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga dapat dilihat dari Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal. Sedangkan cakupan pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal sebesar 100% pada perusahaan/industri yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu juga untuk menjaga kebersihan dilakukan gotong royong kebersihan lingkungan setiap dua minggu sekali Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada tahun 2025, sebanyak () program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis ini, terdiri dari :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan ketangguhan wilayah dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,62 %	76,40 %	90,28 %
		Indeks Kualitas Air (IKA)	52,90 %	73,32 %	138,60 %
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	35,11 %	55,69 %	158,62 %
Rata-Rata Efektivitas				129.16 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Program Perangkat Dinas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan ketangguhan wilayah dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	125.000.000,00	37.960.850,00	69,63 %
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	4.628.993.950,00	3.331.825.821,00	28,02 %
Rata-Rata Efektivitas				48,82 %	

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah :

- 1) Adanya penanaman ruang terbuka hijau dan mempertahankan tanaman perindang mampu menjaga kualitas udara;
- 2) Adanya Sosialisasi tentang pengolahan sampah serta pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari;
- 3) Adanya pemantauan serta pengawasan terhadap perusahaan yang ada;
- 4) Dukungan anggaran, sarana dan prasarana pendukung teknis yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, serta berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan;

- 5) Adanya regulasi yang secara intens disosialisasikan dan didukung dengan anggaran yang cukup;
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan setiap tahun;
- 7) Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan semakin meningkat, yaitu dengan terbentuknya beberapa kelompok pengelola sampah mandiri.

2. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit Perangkat Daerah dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Indikator Ketahanan Daerah (IKD) sendiri merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRBI. Semakin tinggi nilai IKD, makin tinggi pula kapasitas yang dimiliki sebuah daerah dan otomatis menekan skor IRBI. Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2025, dalam hal mengukur telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target sebesar 81,91 % dengan realisasi belum diketahui dikarenakan hasil publikasi dari BNPB belum keluar.

Jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang selama Tahun 2025 terjadi 52 Kasus, jumlah ini naik dari tahun sebelumnya sebanyak 40 Kasus dan korban akibat bencana tersebut sebanyak 45.191 Orang naik dari Tahun sebelumnya sebanyak 11.408 (2.852 KK) Orang, bencana ini terdiri dari banjir, angin kencang/angin puting

LKJIP 2025

beliung, tanah longsor, petir, kebakaran, orang tenggelam, rumah roboh dan semburan lumpur gas dan jumlah bencana yang berhasil ditangani sebanyak 52 kasus.

Daerah yang rentan terhadap kemungkinan terkena bencana : Kecamatan Menggala, Gedung Meneng, Dente Teladas, Rawapitu, Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur, Gedung Aji Baru dan Banjar Margo.

Analisis atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Efektivitas
1.	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,52 %	0,53 %	101,92 %
Rata-Rata Efektivitas				101,92 %	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.017.198.150,00	930.651.376,00	8,51 %
Rata-Rata Efisiensi				8,51 %	

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana. Pada tahun 2025, sebanyak 1 (satu) program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis ini, yaitu :

1). Program Penanggulangan bencana

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana adalah :

1. Melakukan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana kepada seluruh Personel dan petugas BPBD Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bersinergi dengan Lintas Personel yang terkait, Masyarakat sekitar Bencana, Polisi, Basarnas, Tim Sar, Anggota TNI, Pol PP, Hansip Linmas;
3. Mensosialisasikan ke masyarakat pentingnya tanggap bencana dan segera

melaporkan kepetugas terkait bencana agar tidak menimbulkan korban.

4. Kapasitas SDM, Koordinasi dan Kolaborasi, ketersediaan sumber daya, kesadaran dan partisipasi masyarakat, teknologi dan sistem informasi, kerangka hukum dan kebijakan dan pengelolaan risiko berbasis lokal.

1.5 AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi APBD Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2025 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan, fluktuasi tersebut terjadi pada pendapatan, belanja maupun surplus/defisit daerah. Ringkasan realisasi APBD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.41 Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025***

NO.	REALISASI ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pendapatan	1.327.076.846.013,00	1.215.570.473.282,05
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	183.576.819.636,00	143.242.901.230,05
3	Pendapatan Transfer	1.143.500.026.377,00	1.072.327.572.052,00
4	Belanja	1.341.474.598.327,00	1.179.754.814.738,72
5	Belanja Operasi	1.005.678.036.651,00	870.566.797.277,34
6	Belanja Modal	121.846.237.240,00	105.577.263.711,38
7	Belanja Tak Terduga	3.200.000.000,00	324.978.613,00
8	Belanja Transfer	210.750.324.436,00	203.285.775.137,00
9	Surplus/Defisit	- 14.397.752.314,00	35.815.658.543,33
10	Pembiayaan	14.397.752.314,00	- 1.000.000.000,00
11	Penerimaan Pembiayaan	15.697.752.314,00	-
12	Pengeluaran Pembiayaan	1.300.000.000,00	1.000.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

*angka per tanggal 31 Desember 2025

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

APBD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 untuk anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 1.327.076.846.013,00 dan belanja daerah sebesar Rp. 1.341.474.598.327,00,- sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. -14.397.752.314,00,- yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2025 untuk pendapatan daerah sebesar Rp. 1.215.570.473.282,05,- dan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.179.754.814.738,72,-

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 15.697.752.314,00,- yang digunakan untuk membiayai Belanja.

Adapun realisasi anggaran belanja langsung per perangkat daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.42 Anggaran dan Realisasi APBD Perangkat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025***

NO.	REALISASI ANGGARAN	PENDAPATAN		BELANJA	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			355.247.156.386,00	332.095.059.834,00
2	DINAS KESEHATAN	19.784.018.130,00	15.461.935.033,49	129.842.623.920,00	108.453.559.371,49
3	RSUD MENGALA	59.000.000.000,00	41.410.100.811,00	119.310.161.149,00	84.390.244.339,89
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.546.960.000,00	2.181.558.919,00	109.709.531.640,00	98.202.075.849,34
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			4.634.238.450,00	4.464.944.508,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			11.772.250.631,00	10.387.563.708,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			4.275.938.497,00	3.893.756.263,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			5.443.047.818,00	5.228.447.354,00
9	DINAS SOSIAL			8.354.658.608,00	5.675.227.653,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			4.591.882.030,00	4.164.838.510,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.888.313.642,00	2.575.017.920,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN			3.012.178.591,00	2.647.420.128,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	60.000.000,00	49.480.000,00	8.180.993.574,00	6.597.376.309,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.009.296.123,00	5.243.576.775,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG			7.454.563.475,00	7.009.553.697,00
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			10.933.707.153,00	7.569.685.380,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	410.000.000,00	410.123.000,00	8.949.447.524,00	8.272.060.078,00
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.450.082.596,00	9.239.173.360,00
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1.719.654.283,00	1.252.235.940,00	5.746.285.804,00	4.994.284.240,00
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			5.810.673.489,00	5.304.490.309,00
21	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			8.093.633.550,00	5.848.542.822,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3.470.879.734,00	3.091.330.572,00
23	DINAS PERIKANAN			4.818.482.857,00	4.203.708.078,00

NO.	REALISASI ANGGARAN	PENDAPATAN		BELANJA	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
24	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			4.811.121.501,00	4.470.352.186,00
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	50.000.000,00	37.850.000,00	2.239.988.110,00	1.649.677.541,00
26	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	14.337.841.945,00	12.108.732.747,00
27	DINAS PERDAGANGAN	-	-	3.290.954.340,00	3.149.397.103,00
28	SEKRETARIAT DAERAH			72.866.468.456,00	64.286.687.218,00
29	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			64.766.394.267,00	58.112.046.540,00
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			11.911.975.641,00	10.366.562.649,00
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.163.352.160.664,00	1.087.346.654.062,81	249.465.437.940,00	225.772.678.971,00
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	81.154.052.936,00	67.420.535.515,75	14.100.015.365,00	11.236.510.213,00
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			7.264.614.500,00	6.458.134.045,00
34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			2.547.401.951,00	2.345.035.628,00
35	INSPEKTORAT			15.784.343.417,00	14.611.067.793,00
36	KECAMATAN MENGGALA			5.188.627.237,00	4.550.587.140,00
37	KECAMATAN BANJAR AGUNG			2.679.041.367,00	2.452.143.798,00
38	KECAMATAN GEDUNG AJI			1.689.603.617,00	1.594.868.296,00
39	KECAMATAN RAWA JITU SELATAN			1.781.413.104,00	1.633.532.593,00
40	KECAMATAN GEDUNG MENENG			1.989.595.016,00	1.785.336.230,00
41	KECAMATAN PENAWAR TAMA			2.006.806.521,00	1.896.015.632,00
42	KECAMATAN RAWA JITU TIMUR			1.568.143.461,00	1.395.776.102,00
43	KECAMATAN BANJAR MARGO			2.237.153.903,00	1.997.337.113,00
44	KECAMATAN PENAWAR AJI			1.618.787.484,00	1.423.252.319,00
45	KECAMATAN MENGGALA TIMUR			2.008.678.543,00	1.849.875.761,00
46	KECAMATAN RAWA PITU			1.849.619.292,00	1.706.024.326,00
47	KECAMATAN BANJAR BARU			1.845.912.451,00	1.720.052.754,00
48	KECAMATAN DENTE TELADAS			1.576.744.359,00	1.454.456.281,00
49	KECAMATAN MERAKSA AJI			1.634.124.416,00	1.505.763.846,00
50	KECAMATAN GEDUNG AJI BARU			1.844.113.680,00	1.660.046.236,00
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH			7.569.649.202,00	7.010.926.619,00
	TOTAL	1.327.076.846.013,00	1.215.570.473.282,05	1.341.474.598.327,00	1.179.754.814.738,72

* Angka per tanggal 31 Desember 2025

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis dan ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya sebanyak 14 (empat belas) sasaran strategis, 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dan secara umum diturunkan ke Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, namun masih ada 2 indikator yang belum diketahui hasilnya.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029, khususnya untuk tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

Capaian prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang selama Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Penghargaan Terbaik atas Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD)
2. Penghargaan Kinerja Penginputan Calon Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Predikat Terbaik;
3. Penghargaan Nasional Indonesia Golden Awards 2026 atas Kinerja Terbaik dalam Membangun Sinergitas, Integritas dan Kolaborasi serta Pelayanan terhadap Masyarakat;
4. Penghargaan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 11 Tahun berturut-turut
5. Penghargaan The Leader Magazine Awards 2025 Category “The Best Leader Indonesia 2025” dari Seven Media Asia;
6. Penghargaan Daerah Penompang Ketahanan Pangan Tahun 2025 dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMS) Provinsi Lampung;
7. Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Penghargaan “Badan Publik Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung 2025;
9. Penghargaan “Best Visioner Leader of Indonesia 2025” dari Seven Media Asia;
10. Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas Dukungan Gerakan Pembangian Bendera Merah Putih Tahun 2025 (HUT RI KE-80);
11. Penghargaan Keberhasilan Pengukuran Indeks Haroni Indonesia (IHAI) Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri RI;
12. Piagam Penghargaan dari Lembaga Adat Megow Pak atas Renovasi Sesat Agung Megow Pak dan Pembangunan Fisik Lainnya;
13. Penghargaan UGM-KAGAMA Regional Champion Appreciation pada Kagama Regional Leader Forum (KRLF) 2025 atas Kontribusi Nyata dalam Pembangunan Daerah.

